

**PERAN PENDAMPING PKH DALAM MENDORONG
KEMANDIRIAN MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN
RAJABASA JAYA, KECAMATAN RAJABASA, KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

**Oleh:
Santa Monica Sihombing
NPM 2216011075**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

**PERAN PENDAMPING PKH DALAM MENDORONG
KEMANDIRIAN MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN
RAJABASA JAYA, KECAMATAN RAJABASA, KOTA
BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:
Santa Monica Sihombing**

**SKRIPSI
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

**Pada
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

PERAN PENDAMPING PKH DALAM MENDORONG KEMANDIRIAN MASYARAKAT MISKIN DI KELURAHAN RAJABASA JAYA, KECAMATAN RAJABASA, KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh
Santa Monica Sihombing

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendamping PKH dalam mendorong kemandirian masyarakat miskin di Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. informan penelitian terdiri dari pendamping PKH dan KPM yang dipilih secara *purposive*. Analisis penelitian ini menggunakan perspektif struktural fungsionalis Robert K. merton, khususnya konsep peran, *role set*, fungsi manifes, fungsi laten, dan disfungsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH menjalankan peran sebagai fasilitator, edukator, dan advokator dalam menjalankan fungsi program PKH, seperti memfasilitasi layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, serta memberikan edukasi dan pendampingan rutin kepada KPM. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan berupa ketergantungan KPM terhadap bantuan, rendahnya partisipasi sebagian KPM, serta keterbatasan sumber daya yang memunculkan ketegangan peran. Dengan demikian, peran pendamping PKH memiliki fungsi penting dalam mendorong kemandirian masyarakat miskin, meskipun masih memerlukan penguatan peran dan dukungan struktural agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, pendamping PKH, struktural fungsionalis, kemandirian.

ABSTRACT

THE ROLE OF PKH FACILITATORS IN PROMOTING THE INDEPENDENCE OF THE POOR COMMUNITY IN RAJABASA JAYA VILLAGE, RAJABASA DISTRICT, BANDAR LAMPUNG CITY

By

Santa Monica Sihombing

This study aims to analyze the role of Program Keluarga Harapan (PKH) facilitators in promoting the independence of the poor community in Rajabasa Jaya Village, Rajabasa District, Bandar Lampung City, as well as to identify obstacles in its implementation. This research employed a descriptive qualitative method with data collection techniques consisting of observation, interviews, and documentation. The research informants included PKH facilitators and Beneficiary Families (Keluarga Penerima Manfaat/KPM), who were selected purposively. The analysis was conducted using Robert K. Merton's structural functionalist perspective, particularly the concepts of role, role-set, manifest functions, latent functions, and dysfunctions. The results indicate that PKH facilitators perform their roles as facilitators, educators, and advocates in carrying out the functions of the PKH program, such as facilitating access to education, health, and social welfare services, as well as providing routine education and assistance to KPM. However, several obstacles were identified, including the dependence of some beneficiaries on social assistance, low participation among certain KPM, and limited resources, which lead to role strain. Therefore, PKH facilitators play an important function in promoting the independence of the poor community, although strengthening their roles and structural support is still required to achieve optimal program objectives.

Keywords: Program Keluarga Harapan, PKH facilitators, structural functionalism, independence.

Judul Skripsi

: **PERAN PENDAMPING PKH DALAM
MENDORONG KEMANDIRIAN MASYARAKAT
MISKIN DI KELURAHAN RAJABASA JAYA,
KECAMATAN RAJABASA, KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Santa Monica Sihombing**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2216011075**

Jurusan

: **Sosiologi**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Handi Mulyaningsih, M.Si.
NIP. 196312161989022001

2. Ketua Jurusan Sosiologi



Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
NIP. 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Handi Mulyaningsih, M.Si.



Penguji Utama : Junaidi, S.Pd., M.Sos.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Ujian Sidang Skripsi: 02 Februari 2026



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN SOSIOLOGI

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng, B. Lampung 35145
Website: <http://sosiologi.fisip.unila.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 02 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



Santa Monica Sihombing

NPM 2216011075

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Santa Monica Sihombing yang kerap dipanggil Santa. Penulis lahir di Jakarta, 14 Mei 2003 dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, yang merupakan putri dari Bapak Halashon Sihombing dan Ibu Enita Florens Banjar Nahor. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN Sumber Jaya 05 dan diselesaikan pada tahun 2016. Kemudian, Penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 5 Tambun Selatan dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya, penulis melanjutkan jenjang pendidikan sekolah menengah atas SMA dan lulus di tahun 2022. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tahun 2022 pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti kegiatan kerohanian seperti Persekutuan Doa *Oikumene* (PDO) pada tingkat fakultas. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan Rohani di tingkat universitas di Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen (UKMK) dan menjadi bagian anggota dari tim multimedia selama 1 tahun. Kemudian, pada semester 6 di tahun 2025, penulis melaksanakan magang mandiri selama satu semester di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung dan ditempatkan di divisi Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PMPEP). Selama kegiatan magang, penulis aktif mengikuti berbagai rapat yang dilaksanakan seperti RPJMD, RKPD, RPJPD. Selain itu, penulis juga aktif membantu dalam proses penginputan data. Penulis juga mengabdikan ilmu dan keahlian yang dimiliki kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sindang Agung, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara pada gelombang 1 tahun 2025.

MOTTO

“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya”
(Matius 21:22)

“Dalam setiap proses, Tuhan menyertai, meneguhkan, dan menolong aku.”
(Yesaya 41:10)

“Education's purpose it to replace an empty mind with an open one”
(Tujuan pendidikan adalah menggantikan pikiran yang kosong dengan pikiran yang terbuka)
Malcolm Forbes

“Hadapi semuanya langsung di muka, apapun yang terjadi tidak apa”
Hindia (Baskara Putra)

“Que sera, sera. Whatever will be, will be.”
Doris Day

“At least, i just do my best all the time.”
Santa Monica Sihombing

PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus

Atas kasih, rahmat, dan penyertaan-Nya yang senantiasa menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur, terima kasih, dan kasih sayang kepada:

Kedua Orang Tua

Bapak Halashon Sihombing dan Ibu Enita Florens Banjarnahor atas cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis serta didikan, dukungan, pengorbanan, kesabaran, dan doa-doa yang tidak pernah henti mengiringi langkah penulis.

Kakak dan Adikku

Elisa Putri Hani Sihombing dan Margaretha Sihombing, yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan semangat kepada penulis dalam setiap proses yang dijalani. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, baik dalam suka maupun duka.

Para Pendidik dan Bapak Ibu Dosen

Yang telah berjasa memberikan ilmu dan bimbingan nya dengan ketulusan serta kesabaran tanpa batas.

Sahabat-Sahabatku

Terimakasih untuk setiap kebersamaan yang dilalu dengan penuh canda dan tawa bahkan air mata. Terimakasih selalu mendukung dan bersedia menjadi tempat bersandar saat hari-hari buruk datang. Semoga kalian selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Almameterku Tercinta

Universitas Lampung

SAN WACANA

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas kasih, anugerah, dan penyertaan-Nya yang senantiasa menyertai penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Pendamping PKH dalam Mendorong Kemandirian Masyarakat Miskin di Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi pada jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Skripsi ini merupakan buah hasil dari perjalanan penulis. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai keterbatasan, baik dari segi pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan penulis terbuka terhadap kritik serta saran yang bersifat membangun. Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan nikmat dan ridho yang luar biasa sekaligus memberikan kekuatan, kemampuan, kelancaran, ilmu pengetahuan, dan penyertaan di setiap langkah penulis yang pada akhirnya bisa menghasilkan karya sederhana ini dengan sebaik-baiknya.
2. Mamahku tercinta, Ibu Enita, yang telah menjadi sosok paling berjasa dalam hidup saya. Terima kasih telah menjadi garda terdepan di setiap proses yang saya alami. Terima kasih karena telah menjadi tempat curahan hati saya. Terimakasih atas segala pengorbanan baik dari segi biaya maupun tenaga yang mamah curahkan tanpa henti. Terima kasih selalu mengusahakan yang terbaik

untuk anakmu ini agar bisa meraih gelar sarjana. Terima kasih atas segala doa-doa yang selalu menyertai langkah saya dan penyemangat terbesar saya.

3. Bapak tercinta, Bapak Halashon, atas segala dukungan dan doa yang menyertai tanpa henti. Terima kasih karena telah menjadi tempat curahan hati saya ketika saya dalam kondisi terpuruk. Terima kasih atas afirmasi positif yang diberikan yang menjadi penyemangat bagi saya. Terima kasih karena telah berusaha dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk anakmu.
4. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, S.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi.
7. Bapak Junaidi, S.Pd., M.Sos., selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Universitas Lampung serta selaku dosen pembahas penulis. Penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya karena telah memberikan banyak masukan, saran, serta kritik untuk perbaikan dari skripsi ini, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
8. Ibu Dr. Handi Mulyaningsih, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi, saya ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas bimbingan, masukan, saran, maupun kritik untuk perbaikan skripsi ini dan tentunya memberikan semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal, saya ucapkan terimakasih banyak semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
9. Ibu Dr. Dewi Ayu Hidayati, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik, saya ucapkan terimakasih banyak kepada ibu Dewi karena telah memberikan banyak motivasi dan semangat untuk saya dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Untuk Kakakku, Elisa Putri Hani Sihombing, terimakasih telah menjadi panutan dan penyemangat untuk adiknya. Terima kasih selalu mendukung disetiap proses adiknya. serta telah mengusahakan yang terbaik untuk adiknya.

Semoga kelak kakak selalu disertai kebahagiaan dan mendapatkan pasangan hidup yang terbaik.

12. Untuk Adikku, Margaretha Sihombing, terima kasih telah menjadi penyemangat untuk kakaknya yang telah sampai pada tahap ini, besar harapan kakak untuk engkau agar sukses dimasa depan.
13. Untuk teman-teman seperjuangan Sosiologi 2022 yang telah memberikan banyak kenangan serta kebersamaan yang selalu dirasakan penulis selama masa perkuliahan.
14. Untuk teman-teman pertamaku di perkuliahan Equin, Ingrid, Elisabeth terimakasih sudah menjadi teman penulis mulai dari awal perkuliahan sampai saat ini. Terima kasih telah mendengarkan segala cerita penulis. Semoga kelak kita bertemu dalam kesuksesan yang telah kita capai.
15. Untuk Sobat Nuju dan Family 100 Rara, Ala, Nasywa, Aul, Opra, Aga, Sanje, Felia, Cheri, Uqii, Hutri, Haryadi. Terima kasih telah membersamai penulis dalam proses penyusunan skripsi ini serta telah memberikan banyak kenangan yang tak akan pernah dilupakan oleh penulis. Terima kasih telah mendengar segala cerita penulis baik suka maupun duka dan meyakinkan penulis bahwa penulis mampu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga akita semua sukses dimasa depan dan pertemanan ini tetap terjaga di masa yang mendatang.
16. Untuk Keluarga Sihombing Rifky, Imanuel, Arya, Billy, Equina, Ingrid, Elisabeth. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan perantauan penulis. Terima kasih telah memberikan banyak kenangan di masa perkuliahan. Semoga kita bisa bertemu kembali di masa depan dengan kesuksesan yang telah kita capai.
17. Untuk teman-teman magangku di PMPEP Bappeda FrinCESS, Ghina, Casandra terimakasih telah menjadi partner dan teman bagi penulis selama masa 6 bulan magang. Terima kasih sudah mau mengajari penulis ketika penulis merasa bingung serta kesulitan dan terimakasih telah membersamai penulis selama magang.
18. Untuk sahabat-sahabatku pargriya, Netha, Sorta, Pio, Reva, Trista, dan Winda, terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus saudara bagi penulis, telah memberikan dukungan, serta menjadi tempat berbagi dan mencurahkan

berbagai cerita. Terima kasih karena telah kebersamaan penulis hingga saat ini dan telah menjadi salah satu bagian dalam hidup penulis. Kehadiran kalian tidak hanya sebagai sahabat, tetapi juga sebagai keluarga yang selalu memberi dukungan dan semangat di setiap perjalanan penulis. Semoga setiap kenangan yang telah tercipta menjadi bagian berharga yang akan selalu diingat, dan persahabatan ini senantiasa terjaga dalam di masa yang akan datang.

19. Untuk Netha teman kecil penulis terimakasih telah menjadi teman pertama penulis sewaktu penulis pindah rumah. Terima kasih telah menemani penulis selama kurang lebih 13 tahun, melalui banyak cerita, tawa, dan proses tumbuh bersama. Persahabatan ini bukan hanya tentang lamanya waktu, tetapi tentang kebersamaan yang tulus dan kenangan yang akan selalu penulis simpan.
20. Teman-teman KKN Desa Sindang Agung, Alif, Nadia, Joy, Pretty, Nabila, dan Siti yang sudah memberikan kenangan indah selama 40 hari.

Penulis berdoa dan berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca meskipun tulisan di dalam skripsi ini tidak sempurna.

Bandar lampung, 19 Februari 2026
Penulis

Santa Monica Sihombing
2216011075

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
I. PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Peran Pendamping PKH.....	18
2.1.1. Tinjauan tentang Status dan Peran	18
2.1.2. Definisi Pendamping PKH	19
2.1.3. Peran dan Fungsi Pendamping PKH.....	20
2.2 Kemandirian.....	23
2.2.1 Pengertian Kemandirian	23
2.2.2 Dimensi Kemandirian Masyarakat	24
2.2.3 Aspek-Aspek Kemandirian	25
2.2.4. Pemberdayaan Kemandirian Masyarakat Miskin	26
2.3 Kemiskinan	27
2.3.1 Pengertian Kemiskinan	27
2.3.2 Penyebab Terjadinya Kemiskinan	29
2.3.3 Pengukuran Kemiskinan	30
2.4 Program Keluarga Harapan (PKH)	30
2.4.1 Pengertian Program Keluarga Harapan.....	30
2.4.2 Tujuan PKH	31
2.4.3 Komponen Program Keluarga Harapan (PKH).....	31
2.4.4. Peran Pendamping dalam Membangun Kemandirian	32
2.5 Landasan Teori	33
2.5.1. Teori Struktural Fungsionalis Robert K. Merton	33
2.5.2. Teori Peran dalam Perspektif Struktural Fungsionalis	35
2.5.3. Peran Pendamping PKH dalam Perspektif Teori Peran	37
2.6 Penelitian Terdahulu	38

2.7	Kerangka Berfikir	40
III.	METODE PENELITIAN	42
3.1	Jenis Penelitian	42
3.2	Lokasi Penelitian	43
3.3	Fokus Penelitian	43
3.4	Informan Penelitian.....	45
3.5	Sumber Data	46
3.6	Teknik Pengumpulan Data	47
3.7	Teknik Analisis Data.....	50
3.8	Teknik Keabsahan Data.....	52
IV.	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	55
4.1	Letak Geografis dan Kondisi Wilayah	55
4.1.1	Sejarah Singkat Kelurahan Rajabasa	55
4.1.2	Luas Wilayah	56
4.1.3	Kondisi Geografis dan Topografi	57
4.2	Kondisi Demografis	58
4.2.1	Jumlah Penduduk	58
4.2.2	Usia Penduduk	59
4.2.3	Agama Penduduk.....	61
4.2.4	Tingkat Pendidikan Penduduk.....	62
4.3	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	64
4.3.1	Mata Pencarian Penduduk	64
4.3.2	Jumlah Penduduk Miskin	66
4.3.3	Kehidupan Sosial	67
4.4	Gambaran PKH di Kelurahan Rajabasa Jaya	68
4.5	Gambaran Pendamping PKH di Kelurahan Rajabasa Jaya	72
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	75
5.1	Profil Informan	76
5.2	Hasil Penelitian	81
5.2.1	Peran Pendamping PKH dalam Mendorong Kemandirian Masyarakat Miskin	82
5.2.2	Memfasilitasi Pertemuan Kelompok.....	83
5.2.3	Pendampingan dalam Akses Pendidikan	86
5.2.4	Pendampingan dalam Akses Kesehatan.....	90
5.2.5	Pendampingan dalam Akses Kesejahteraan Sosial	94
5.2.6	Mendampingi Proses Pembayaran	97
5.2.1	Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat	107
5.2.1.1	Kemandirian Ekonomi	108
5.2.1.2	Kemandirian Pengambilan Keputusan.....	111
5.2.1.3	Perubahan Pola Pikir Menuju Kemandirian.....	113
5.2.2	Hambatan Pendampingan	115
5.2.2.1	Hambatan Teknis	116
5.2.2.2	Rendahnya Partisipasi KPM	118

5.2.2.3	Keterbatasan Dukungan Program (Tidak adanya Pelatihan UMKM)	120
5.3	Pembahasan	122
5.3.1	Peran Pendamping PKH dalam Mendorong Kemandirian Masyarakat Miskin	123
5.3.2	Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat	126
5.3.3	Hambatan Pendampingan	128
VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	133
6.1	Kesimpulan	133
6.2	Saran.....	134
	DAFTAR PUSTAKA	136

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penerima PKH Kota Bandar Lampung 2022	13
Tabel 2. Penerima PKH Kelurahan Rajabasa Jaya	14
Tabel 3. Hasil Observasi	48
Tabel 4. Hasil Triangulasi Sumber.....	53
Tabel 5. Wilayah Kelurahan Rajabasa Jaya.....	56
Tabel 6. Jumlah Penduduk Kelurahan Rajabasa Jaya	59
Tabel 7. Data Usia Penduduk Kelurahan Rajabasa Jaya.....	61
Tabel 8. Data Agama Penduduk	62
Tabel 9. Tingkat Pendidikan Penduduk.....	63
Tabel 10. Data Pekerjaan Penduduk	65
Tabel 11. Graduasi Mandiri	69
Tabel 12. Deskripsi Peran Pendamping	73
Tabel 13. Profil Informan	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase Kemiskinan di Provinsi Lampung 2024	11
Gambar 2. Kerangka Pikir.....	41
Gambar 3. Cara melakukan triangulasi sumber	53
Gambar 4. Pertemuan Kelompok	86
Gambar 5. Proses Verifikasi Sekolah Rakyat	90
Gambar 6. Kegiatan Cek Kesehatan di Posyandu	94
Gambar 7. Pendamping Mendampingi Proses Pencairan.	98
Gambar 8. Kegiatan Penyampaian Materi	101

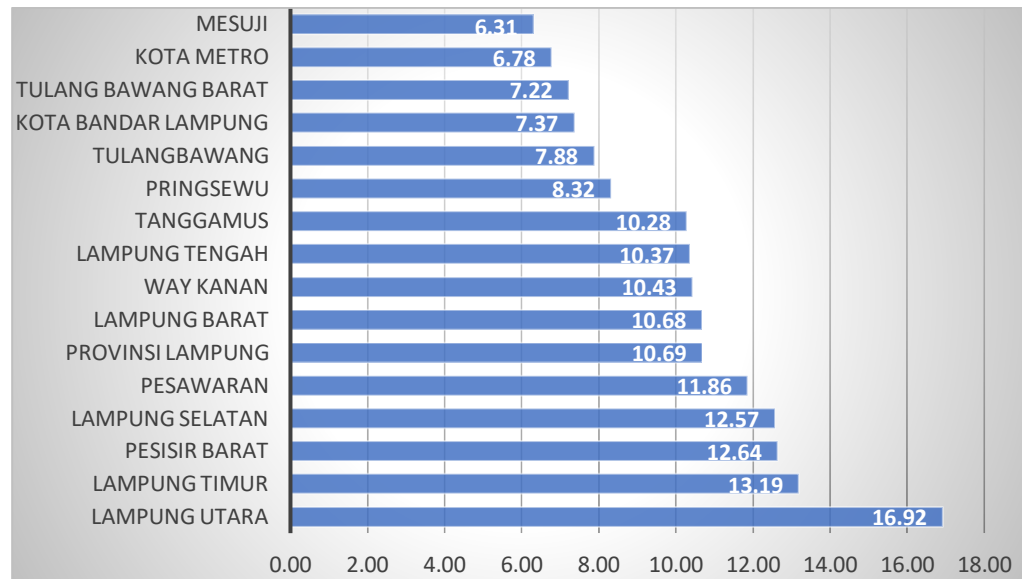
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendasar yang dialami hampir di setiap negara, terutama di negara berkembang. Isu kemiskinan tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi juga menurunkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas kesenjangan sosial. Kemiskinan bersifat kompleks dan saling berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan (Madaliyah et al., 2024).

Tingginya angka kemiskinan sering kali menjadi hambatan dalam upaya memajukan suatu bangsa. Selain mencerminkan keterbelakangan pembangunan, kemiskinan juga berkontribusi pada ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, Gini Ratio sebagai ukuran pengeluaran penduduk Indonesia pada September 2024 tercatat 0,381.

Kemiskinan dianggap sebagai kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, yang didalamnya terdapat makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan masih menjadi permasalahan yang multidimensional. Masalah kemiskinan muncul akibat adanya ketidakadilan bagi masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan akses bagi masyarakat miskin dalam menerima layanan yang mampu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Sehingga, mereka terpaksa hidup dengan memaksimalkan sumber daya yang mereka miliki (Madaliyah et al., 2024).



Gambar 1. Persentase Kemiskinan di Provinsi Lampung 2024

Sumber: BPS Provinsi Lampung

Menurut Data BPS Provinsi Lampung 2024, tingkat kemiskinan menunjukkan adanya kesenjangan antarwilayah. Kabupaten Lampung Utara tercatat sebagai daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi, yaitu 16,92%, sementara Kota Bandar Lampung memiliki angka lebih rendah yaitu 7,37%, di bawah rata-rata provinsi sebesar 10,69%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan di Provinsi Lampung secara keseluruhan mengalami penurunan namun, pemerataan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Maka dari itu, dalam menanggulangi kemiskinan, pemerintah menjalankan berbagai program bantuan sosial (bansos) yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan. Program tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), yakni bantuan bersyarat bagi keluarga miskin. Selain itu, terdapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau kartu sembako yang disalurkan dalam bentuk bantuan pangan pokok untuk menjaga ketahanan pangan keluarga penerima manfaat. Tak hanya itu, pemerintah juga menyelenggarakan Program Indonesia Pintar PIP dan KIP Kuliah sebagai bentuk dukungan pendidikan bagi anak sekolah maupun mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu (Rizal & Purnairawan, 2024). Pemerintah

memberikan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat miskin (Rizal & Purnairawan, 2024).

Program-program tersebut berperan penting dalam menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin, mulai dari pangan, pendidikan, dan kesehatan. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan seperti penggunaan dana bantuan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, permasalahan kualitas pelayanan kesehatan yang tidak merata, dan cenderung bersifat sektoral.

Berbeda dengan itu, Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki cakupan yang lebih komprehensif dibandingkan program bantuan sosial lainnya. PKH merupakan bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Rizal & Purnairawan, 2024). Melalui bantuan ini, PKH tidak hanya meringankan beban ekonomi keluarga penerima dalam jangka pendek, tetapi juga diharapkan dapat memperluas akses mereka terhadap kebutuhan dasar. Dengan demikian, PKH tidak hanya menempati posisi penting dalam strategi perlindungan sosial pemerintah karena tidak hanya berfungsi sebagai instrumen jaringan pengaman sosial, tetapi juga sebagai upaya jangka panjang dalam membangun kemandirian masyarakat miskin (Madaliyah et al., 2024).

Namun, bantuan sosial seperti PKH tidak bisa dipandang sebagai solusi permanen saja. Keberhasilan program ini sangat ditentukan melalui sejauh mana keluarga penerima manfaat mampu keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial tersebut. Oleh karena itu, kemandirian masyarakat miskin menjadi suatu hal yang sangat penting dalam penurunan kemiskinan. Urgensi ini penting agar tujuan PKH tidak hanya sebatas meringankan beban ekonomi tetapi mendorong perubahan perilaku dan keberdayaan masyarakat miskin (Madaliyah et al., 2024).

Program Keluarga Harapan (PKH) mulai diimplementasikan di Provinsi Lampung sejak tahun 2011. Hal ini terus diperluas hingga menyebar di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. Tujuan utama PKH adalah

untuk meringankan beban ekonomi sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar Keluarga Penerima Manfaat dapat mencapai kesejahteraannya (Nurandani et al., 2022). Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, jumlah penerima PKH pada tahun 2022 mencapai 35.178 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Angka ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung menjadi salah satu wilayah dengan cakupan PKH yang cukup besar.

Tabel 1. Penerima PKH Kota Bandar Lampung 2022

Kecamatan	Jumlah KPM
Bumi Waras	2346
Enggal	711
Kedamaian	1185
Kedaton	1435
Kemiling	1951
Labuhan ratu	931
Langkapura	1164
Panjang	3465
Rajabasa	1192
Sukabumi	2016
Sukarame	1075
Tanjung Karang Barat	2339
Tanjung Karang Pusat	2081
Tanjung Karang Timur	1439
Tanjung Senang	808
Teluk Betung Barat	2295
Teluk Betung Selatan	2163
Teluk Betung Timur	2896
Teluk Betung Utara	1850
Way Halim	1836

Sumber: Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Pada tabel 1 menandakan total KPM di Kota Bandar Lampung berbeda-beda di tiap Kecamatan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk, jumlah penerima, dan kerentanan ekonomi. Di antara kecamatan yang ada, Kecamatan Rajabasa, khususnya Kelurahan Rajabasa Jaya, memiliki jumlah KPM yang signifikan dan menjadi salah satu fokus penting pelaksanaan PKH.

Tabel 2. Penerima PKH Kelurahan Rajabasa Jaya

Wilayah	Kampung	Jumlah KPM
Lingkungan I	Kampung Sukajaya dan Kampung Sumberejo	175
Lingkungan II	Kampung Lingsuh, Kampung Bayur dan Kampung Sinar Harapan	215
Jumlah		390

Sumber: Kelurahan Rajabasa Jaya, 2025

Penduduk di kelurahan Rajabasa Jaya berjumlah 12.471 jiwa dengan rata-rata pendidikan hanya sampai SLTA 3.093 orang. Di kelurahan ini jumlah penerima PKH mencapai 390 KPM dengan jumlah penerima manfaat paling banyak di lingkungan II. Berdasarkan data yang dipaparkan memberikan gambaran bahwa Rajabasa Jaya merupakan salah satu wilayah yang signifikan dalam konteks program PKH di tingkat lokal.

Dalam pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH), membutuhkan tenaga yang profesional untuk memperlancar program pelaksanaan PKH yakni pendamping PKH yang merupakan sumber daya manusia yang direkrut oleh Kementerian Sosial. Pendamping PKH mengemban tugas yang berat, khususnya selama menjadi pendamping Program Keluarga Harapan. Pendamping harus melakukan pendataan dan pencairan terhadap keluarga miskin yang berhak menerima bantuan. Selain itu, pendamping melakukan upaya dalam mendata agar PKH dapat tepat sasaran. Maka dari itu, peran pendamping dalam pelaksanaan program di lapangan sangat menentukan keberhasilan kegiatan program di lapangan (Huda & Siswanto, 2023)

Menurut Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 49, pendamping PKH memiliki peran yang harus dijalankan meliputi: memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh KPM tepat jumlah dan tepat sasaran; melaksanakan pertemuan pendampingan rutin bersama Keluarga Penerima Manfaat; serta memfasilitasi keluarga penerima manfaat PKH untuk mendapatkan bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Menurut Zen (2024) PKH tidak hanya sekedar program bantuan materi saja melainkan

juga bantuan non materi seperti penambahan pengetahuan dan pengelolaan materi yang didapat dalam bentuk pendampingan sosial.

Peran pendamping PKH di Kelurahan Rajabasa tidak hanya memberikan informasi semata, tetapi juga mendorong peserta untuk memenuhi kewajiban mereka, mendampingi dalam proses pelaksanaan, serta menjadi penghubung antar KPM dengan lembaga terkait. Meskipun demikian, masih terdapat kendala yang harus dihadapi, salah satunya adalah masih adanya KPM yang pasif serta masih terdapat ketergantungan pada bantuan program. Hal ini diperparah dengan keterbatasan keterampilan ekonomi sebagian besar keluarga, karena mayoritas kepala rumah tangga bekerja sebagai buruh, pedagang kecil, dan petani dengan penghasilan tak menentu. (Septiani et al., 2018).

Pendamping PKH dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana program di tingkat lokal. Kondisi ini menuntut pendamping untuk melaksanakan peran secara optimal agar KPM di Kelurahan Rajabasa Jaya mampu mengalami perubahan perilaku menuju kemandirian. Dalam perspektif struktural fungsionalisme Robert K. Merton, setiap individu menempati status sosial tertentu yang melahirkan seperangkat peran (*role set*) dengan fungsi spesifik bagi keberlangsungan sistem sosial. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian antara tuntutan peran dan kondisi lapangan yang memunculkan ketegangan peran (*role strain*) sehingga berpotensi menimbulkan disfungsi dalam pelaksanaan program dan menghambat pencapaian tujuan kemandirian keluarga penerima manfaat.

Hingga saat ini, kajian yang secara khusus meneliti peran pendamping PKH dalam membangun kemandirian masyarakat miskin di tingkat kelurahan masih terbatas. Beberapa penelitian yang ada justru menekankan aspek yang berbeda. Misalnya, pada penelitian Utami (2024), lebih menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pendamping PKH. Sementara itu, pada penelitian Faustina et al. (2024) meneliti kontribusi pendamping sosial dalam meningkatkan kemandirian ekonomi Keluarga Penerima Manfaat, tetapi penelitian tersebut dilakukan di Kota Bandung. Adapun penelitian yang

dilakukan Zen (2024) mengkaji peran pendamping PKH terhadap peningkatan kesejahteraan KPM di Kabupaten Tanah Bumbu, namun penelitian tersebut belum menguraikan secara detail mengenai kompleksitas peran pendamping PKH itu sendiri. Meskipun pendamping PKH memiliki peran yang strategis dalam pelaksanaan program mulai dari memastikan kepatuhan KPM terhadap kewajiban, namun peran mereka dalam mendorong kemandirian masyarakat miskin di tingkat kelurahan belum menjadi fokus penelitian akademik.

Keberhasilan PKH bukan hanya dilihat dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi sejauh mana pendamping mampu mengarahkan KPM untuk keluar dari ketergantungan terhadap bantuan. Maka dari itu, penting untuk membuktikan bagaimana peran pendamping PKH di lapangan berkontribusi terhadap tercapainya kemandirian masyarakat miskin, khususnya di Kelurahan Rajabasa Jaya. Selain itu, implementasi PKH perlu dibuktikan secara empiris untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan dampak pelaksanaan nyata pelaksanaan PKH dalam penurunan kemiskinan.

Dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi di Kelurahan Rajabasa Jaya, penting untuk menganalisis sejauh mana pendamping PKH berperan dalam memastikan keberhasilan program ini sebagai strategi penurunan kemiskinan. Fokus utama penelitian ini untuk mengkaji peran yang dijalankan pendamping sebagai fasilitator, edukator, advokator yang berkontribusi pada kemandirian masyarakat miskin serta bagaimana hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Maka dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai **“Peran Pendamping PKH dalam Mendorong Kemandirian Masyarakat Miskin di Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pendamping PKH di Kelurahan Rajabasa Jaya untuk mendorong kemandirian masyarakat?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi pendamping PKH dalam melakukan tugasnya di Kelurahan Rajabasa Jaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran pendamping PKH sebagai fasilitator, edukator, dan advokator terhadap KPM di Kelurahan Rajabasa Jaya guna mendorong kemandirian masyarakat miskin.
2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pendamping PKH dalam proses pendampingan di Kelurahan Rajabasa Jaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu sosial, khususnya dalam kajian mengenai peran sosial pendamping program bantuan sosial. penelitian ini juga memperkaya penerapan teori struktural fungsionalis Robert K. Merton, dengan fokus pada peran pendamping sebagai fasilitator, edukator, dan advokator. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas peran pendamping PKH sebagai program bantuan sosial guna mendorong kemandirian masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana pendamping PKH melaksanakan peran dalam mendorong kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pendamping PKH dalam meningkatkan efektivitas peran pendamping sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam memperbaiki pelaksanaan program PKH di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses fasilitasi menuju kemandirian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran Pendamping PKH

2.1.1. Tinjaun tentang Status dan Peran

Status sosial didefinisikan sebagai kedudukan seseorang dalam suatu kelompok dan hubungannya dengan anggota kelompok yang sama, yang menentukan hak, kewajiban, dan harapan terhadap perilakunya. Dalam kelompok masyarakat, seseorang memiliki status sosial, yaitu kedudukan individu dalam pergaulan hidup manusia (Abdulsyani, 2021). Status sosial biasanya didasarkan pada berbagai unsur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, seperti status, pekerjaan, status dalam kekerabatan, status jabatan, dan status agama yang dianut. Status sosial seseorang merupakan aspek statis yang menunjukkan derajat atau tingkat kedudukan seseorang dalam bermasyarakat, dan memiliki ciri dan perbedaan yang jelas dengan status sosial orang lain.

Menurut Soerjono Soekanto status sosial dibagi menjadi dua yakni, status sosial yang diperoleh atas dasar keturunan (*Ascribed Status*) yang diperoleh sejak lahir tanpa adanya usaha, misalnya jenis kelamin, usia, serta keturunan. Kemudian status yang diperoleh atas dasar usaha yang disengaja (*Achieved Status*), misalnya profesi, jabatan, maupun prestasi. Dengan demikian, status ini menjadi landasan utama yang membedakan kedudukan seseorang dalam struktur sosial.

Berangkat dari penjelasan status sosial diatas, lahirlah peran yang merupakan seperangkat norma, harapan, dan perilaku yang melekat pada suatu status (Merton, 1957). Peran memiliki arti sebagai sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran merupakan sebuah aktivitas yang

diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau status sosial tertentu dalam sebuah organisasi. Menurut terminologi peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Merton (1957) seseorang dapat berperan karena adanya struktur sosial yang melekat pada status tertentu. Seseorang dapat dikatakan berperan jika individu tersebut telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosial dalam masyarakat. Jika seseorang memiliki status sosial tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya ada kecenderungan yang akan timbul suatu harapan baru dan harapan inilah yang membuat seseorang bertindak atau berusaha mencapainya sesuai dengan kemampuannya.

Menurut Levinson, peranan mencakup dalam tiga hal yaitu: *pertama*: peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. *Kedua*: peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. *Ketiga*: peranan juga dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Abdulsyani, 2021).

Namun perlu diketahui bahwa tidak semua individu yang memiliki status otomatis mampu atau mau berperan. Biddle (1986) membedakan antara *role expectation* dengan *role performance*. Peran tidak berjalan ketika terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang dilakukan individu. Dalam hal ini, akan muncul hambatan yang berupa keterbatasan sumber daya, konflik peran dengan kewajiban lain, maupun tekanan sosial yang membuat individu mengalami ketegangan peran.

2.1.2. Definisi Pendamping PKH

Pendamping sosial merupakan pekerja sosial yang selalu berhadapan dan melayani orang baik itu individu, kelompok, atau masyarakat yang mengalami masalah sosial dengan bermaksud untuk membantu mengatasi masalah yang mereka hadapi (Vivi, 2022).

Menurut Vivi (2022), pendamping memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan PKH. Keberadaan pendamping ini dibutuhkan karena sebagian besar keluarga miskin seringkali tidak memiliki kekuatan, akses, maupun kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pihak yang mampu menjadi perantara sekaligus penyambung aspirasi. Di sisi lain, Unit Pelaksana Program keluarga Harapan (UPPKH) di tingkat Kabupaten/Kota memiliki keterbatasan sumber daya manusia sehingga tidak memungkinkan untuk mengawasi seluruh wilayah secara bersamaan.

Menurut Fathu (2020), pendamping PKH merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan khusus serta lolos dalam proses seleksi. Mereka secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial RI untuk melaksanakan tugas pendampingan kepada keluarga penerima manfaat PKH dengan sistem kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, pendamping PKH bertugas di sekretariat UPPKH tingkat kecamatan berlokasi di kantor kecamatan atau di tempat lain yang di gasilitasi oleh pemerintah daerah.

Jumlah pendamping PKH disesuaikan dengan banyaknya peserta tiap kecamatan. Rata-rata satu pendamping membina sekitar 375 RTSM. Setiap 3-4 pendamping dikoordinasi oleh seorang koordinator. Tugas pendamping lebih banyak di lapangan, seperti mengadakan pertemuan kelompok, berkunjung ke sekolah dan fasilitas kesehatan, serta berdialog dengan tokoh masyarakat maupun keluarga penerima manfaat. Selain itu, pendamping juga aktif di UPPKH Kabupaten/Kota untuk melaporkan perkembangan program setiap bulan.

2.1.3. Peran dan Fungsi Pendamping PKH

Strategi pembangunan sosial yang dijalankan oleh pendamping PKH memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberhasilan proses pendampingan di lapangan. Sebagai mitra pemerintah sekaligus mitra masyarakat, pendampng dituntut untuk mampu menjadi penghubung

antara kepentingan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Permensos RI No. 1 Tahun 2018 Pasal 49 tentang Program Keluarga Harapan, yang menegaskan bahwa kegiatan pendampingan meliputi fasilitasi, edukasi, serta advokasi bagi KPM agar dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran penting dalam memastikan bantuan sosial tidak hanya sampai secara administratif, tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Menurut Permensos RI No. 1 Tahun 2018 Pasal 49 tentang Program Keluarga Harapan peran pendamping PKH sebagai berikut:

1. Fasilitator

Peran fasilitator ini merupakan peran pendamping sosial terhadap keluarga penerima manfaat PKH dalam memberikan dukungan semangat, melatih kemampuan individu ataupun kelompok dalam menyelesaikan masalah serta membantu meningkatkan kepercayaan diri untuk menuju kearah kehidupan yang lebih baik. Peran fasilitatif dibagi menjadi tiga, yakni:

- a. Mendampingi Proses Pembayaran

Pendamping sosial akan melakukan sosialisasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat binaannya, sekaligus membentuk kelompok peserta yang diketuai oleh ketua kelompok yang bertugas mengkoordinasikan langsung terkait dengan program kegiatan peserta PKH. Biasanya pendamping akan meminta jadwal pembayaran dan memastikan peserta yang tepat menerima bantuan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pendamping juga harus memastikan bahwa bantuan yang diterima oleh KPM tepat jumlah dan tepat sasaran.

- b. Memfasilitasi proses pengaduan

Pendamping PKH menjalankan tugasnya dengan menerima dan menindaklanjuti setiap pengaduan yang disampaikan oleh peserta

PKH sebagai bagian dari fasilitatifnya. Melalui proses tersebut, pendamping tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menyelesaikan masalah, tetapi juga sebagai penghubung yang membantu meningkatkan pemahaman penerima terhadap hak dan kewajiban penerima manfaat.

c. Pendampingan rutin

Dalam hal ini, pendamping PKH berperan untuk melakukan kunjungan rutin kepada keluarga penerima manfaat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali. Dalam hal ini, kegiatan pendampingan dilakukan setiap bulannya dengan membantu keluarga untuk memahami dan memenuhi kewajiban program dengan memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah, ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan, serta mendampingi peserta dalam proses pengisian data untuk keperluan PKH. Pada saat pertemuan kelompok pendamping memastikan bahwa KPM mengikuti pertemuan tersebut, dalam pertemuan tersebut pendamping akan memberikan motivasi untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan pendidikan anak-anak. Pendampingan yang dilakukan secara rutin oleh pendamping PKH sangat berguna untuk menyampaikan informasi terkait PKH dan bermanfaat untuk membuka ruang waktu bagi keluarga penerima PKH.

2. Edukator

Pendamping sosial berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Peran pendamping PKH sebagai edukator untuk memberikan pengetahuan serta membagikan pengalaman kepada masyarakat peserta PKH yang minim akan pengetahuan. Pendamping PKH yang bertugas sebagai pendidik adalah untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat dengan membekali masyarakat dengan kemampuan praktis untuk menyelesaikan persoalan secara mandiri melalui mekanisme terstruktur. Mekanisme ini dilakukan melalui

arahan berupa penyampaian modul yang sistematis serta pengawasan melalui kunjungan rumah. Dengan demikian, fungsi edukasi ini mampu mentransformasi pola pikir KPM dalam mengelola aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang akhirnya membawa dampak positif bagi kemandirian keluarga penerima.

3. Advokator

Peran advokator merupakan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pendamping untuk mencari jalan keluar dalam berbagai permasalahan yang dihadapi keluarga penerima terutama terkait dengan akses hak dan layanan publik. Dalam praktiknya, pendamping melakukan advokasi melalui mekanisme identifikasi hambatan birokrasi, mediasi dengan pihak penyedia layanan, serta pendampingan langsung untuk memastikan KPM mendapatkan hak nya. Dengan demikian, pendamping memastikan bahwa kendala teknis maupun sosial yang menghambat kesejahteraan KPM dapat teratasi, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung proses kemandirian atau graduasi mandiri secara berkelanjutan.

2.2 Kemandirian

2.2.1 Pengertian Kemandirian

Kemandirian berasal dari kata "*autonomy*" yaitu sebagai sesuatu yang mandiri, atau kesanggupan untuk berdiri sendiri dengan keberanian dan tanggungjawab atas segala tingkah laku sebagai manusia dewasa dalam melaksanakan kewajibannya guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemandirian masyarakat dapat dipahami sebagai suatu keadaan ketika masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan sosial guna memperbaiki kualitas hidup mereka. Konsep ini menegaskan bahwa kemandirian tidak hanya dipandang dari sisi kemampuan individu semata tetapi lebih menekankan pada kekuatan bersama dalam masyarakat untuk menghadapi persoalan serta memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri (Maryani & Nainggolan, 2019)

Menurut Soekanto, kemandirian diartikan sebagai kemampuan individu maupun kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa ketergantungan pada pihak lain dan tetap dengan mempertahankan relasi sosial dalam struktur masyarakat. Kemandirian bukan berarti melepaskan diri sepenuhnya melainkan kemampuan secara otonom dalam bingkai hubungan sosial yang lebih luas.

2.2.2 Dimensi Kemandirian Masyarakat

Menurut Judith Lee (2001) dimensi kemandirian masyarakat, meliputi:

a. Pengembangan Aspek Positif dan Potensi Diri

Dimensi ini berfokus pada identifikasi dan pengembangan kemampuan, keterampilan, serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam konteks kemandirian, hal ini berarti membangun masyarakat mengenali kekuatan internal mereka dan mengoptimalkan untuk mencapai kemandirian.

Strateginya seperti melakukan pelatihan dan pendidikan dengan mengadakan program-program pelatihan yang meningkatkan keterampilan dan penguasaan masyarakat. Tak hanya itu, penciptaan kesempatan yang mendorong program kewirausahaan sangat penting agar masyarakat dapat menerapkan keterampilan sehingga membuka peluang kerja dan usaha. Terakhir, penguatan jaringan sosial dengan membentuk kelompok atau komunitas yang mendukung memungkinkan individu untuk berbagi pengalaman dan belajar sehingga menciptakan lingkungan yang positif untuk bertumbuh.

b. Membangun Pemahaman Kapasitas dan Kritis

Dimensi ini meliputi pengembangan pengetahuan serta kapasitas dan komprehensif tentang kondisi sosial, politik, dan lingkungan di suatu wilayah. Pemahaman yang kritis ini sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai situasi dan peluang yang dimanfaatkan.

Hal ini dapat melakukan berbagai cara seperti, mengadakan program pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada isu-isu sosial, politik, dan lingkungan agar masyarakat dapat lebih memahami konteks yang memengaruhi kehidupan mereka. Selanjutnya, melakukan diskusi dan forum yang memberikan sudut pandang kritis terhadap kondisi yang ada.

c. Pengembangan Sumber Daya dan Strategi

Dimensi ini mencakup pengembangan sumber daya dan strategi serta kemampuan fungsional untuk mencapai tujuan kolektif. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti identifikasi sumber daya lokal yang membantu masyarakat memahami apa yang mereka miliki dan mereka manfaatkan.

Kemudian, pelatihan keterampilan yang mencakup keterampilan teknis, manajerial, dan kepemimpinan. Selanjutnya, pengembangan rencana aksi kolektif yang melibatkan penentuan langkah-langkah yang diperlukan antara anggota komunitas. Terakhir, membangun kemitraan untuk mendapatkan dukungan tambahan.

2.2.3 Aspek-Aspek Kemandirian

Klasifikasi menurut Havighurst (Dalam DS, 2009) kemandirian memiliki empat aspek utama, yaitu:

1. Aspek Intelektual

Aspek ini ditunjukkan untuk kemampuan individu dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari sejauh mana individu aktif mencari dan memanfaatkan informasi yang relevan untuk menghadapi tantangan yang muncul. Selain itu, aspek ini juga tercermin dalam kemampuan berpikir kritis, yaitu kemampuan individu untuk mengevaluasi informasi, saran, atau argumen secara rasional dan objektif dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, pemecahan masalah, pencarian informasi, dan berpikir kritis menjadi bagian penting

dalam menggambarkan kapasitas individu dalam mengelola dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

2. Aspek Sosial

Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk membangun interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung atau menunggu aksi dari orang lain. Kemampuan ini tercermin dari komunikasi yang efektif, yakni ketika individu dapat menyampaikan pendapat secara jelas dan mendengarkan dan menghargai pendapat atau pandangan orang lain. Aspek sosial juga dilihat dari kemampuan individu dalam menjalin dan mempertahankan hubungan sosial yang positif. Inisiatif sosial menjadi aspek penting yang menunjukkan sejauh mana individu bersikap proaktif dalam memulai percakapan, terlibat dalam kegiatan sosial, dan membangun kerja sama dengan orang lain, sehingga individu tidak bersifat pasif dalam kehidupan sosialnya.

3. Aspek Ekonomi

Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengatur ekonomi dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi dengan orang lain. Kemampuan ini tercermin dari pengelolaan anggaran, yaitu ketika individu mampu merencanakan, mengatur, dan menggunakan pendapatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Selain itu, aspek ini juga terlihat dari adanya pendapatan mandiri yang diperoleh melalui pekerjaan atau usaha yang dijalankan, sehingga individu memiliki sumber penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.2.4. Pemberdayaan Kemandirian Masyarakat Miskin

Pemberdayaan merupakan salah satu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok agar hidup mereka sejahtera serta dapat bertahan sendiri, dapat mengambil keputusan, serta memanfaatkan sumber daya yang ada guna meningkatkan taraf hidup mereka.

Pemberdayaan masyarakat pada akhirnya ditujukan untuk menciptakan kemandirian, yakni kondisi ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, pemberdayaan kemandirian masyarakat miskin tidak hanya menekankan pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada perubahan perilaku, penguatan kapasitas, dan perluasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi (Pakpahan et al. 2024).

Program-program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang tidak hanya untuk memberikan bantuan tunai bersyarat, melainkan juga mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas keluarga penerima manfaat. Perubahan perilaku tercermin dari meningkatnya kesadaran, tanggung jawab, dan pola tindakan KPM dalam pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan kehidupan sehari-hari, sedangkan peningkatan kapasitas terlihat dari bertambahnya kemampuan individu dalam memahami informasi, mengambil keputusan, mengelola sumber daya, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Menurut Faustina *et al.* (2025) keberadaan pendamping dalam PKH sangat berperan penting dalam proses pemberdayaan, karena mereka tidak hanya memfasilitasi bantuan, tetapi juga memberikan motivasi, edukasi, dan mediasi agar keluarga miskin mampu mencapai kemandirian ekonomi.

2.3 Kemiskinan

2.3.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan dimana individu atau kelompok, atau komunitas tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kebutuhan dasar ini mencakup makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sebuah bangsa atau negara secara keseluruhan bisa pula dikategorikan miskin. Pada negara-negara berkembang, kemiskinan sangat terkait dengan aspek struktural. Misalnya, akibat sistem ekonomi yang tidak adil

sehingga merajalelanya KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), dan adanya diskriminasi sosial, atau tidak adanya jaminan sosial

Menurut Suwandi (2024) kemiskinan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain:

- **Ekonomi:** Dari perspektif ekonomi kemiskinan diukur berdasarkan dari pendapatan dan pengeluaran. Salah satu indikator yang digunakan adalah garis kemiskinan berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yakni sebesar Rp. 609.160 per kapita per bulan. Dengan demikian, Jika pendapatan atau pengeluaran seseorang di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan, maka dikategorikan sebagai penduduk miskin.
- **Sosial:** Dari perspektif sosial, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai kekurangan materi, tetapi juga sebagai keterbatasan individu atau rumah tangga dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air bersih, serta rendahnya partisipasi dan posisi mereka dalam kehidupan sosial dan komunitas. Kondisi ini membuat masyarakat miskin berada pada posisi yang kurang berdaya dalam memanfaatkan sumber daya dan kesempatan yang tersedia (Suwandi, 2024).
- **Kultural:** Kemiskinan dapat dilihat dari perspektif kultural, di mana kemiskinan dipahami sebagai kondisi yang berhubungan dengan nilai, norma, dan pola pikir yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat miskin, yang kemudian memengaruhi cara mereka memandang pendidikan, kerja, dan masa depan. Pola nilai dan perilaku ini dapat membatasi kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan peluang yang sebenarnya tersedia guna meningkatkan kesejahteraan mereka (Suwandi, 2024).

Kemiskinan bersifat multidimensional, yang artinya selalu berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan kultural. Kemiskinan dapat menimbulkan masalah yang bersifat menyebar terhadap tatanan kemasyarakatan secara keseluruhan. Beberapa konflik yang terjadi

seperti krisis ekonomi, menunjukkan bahwa ternyata persoalan kemiskinan bukan semata-mata hanya memengaruhi ketahanan ekonomi tetapi juga memengaruhi ketahanan sosial dan nasional (Suwandi, 2024).

2.3.2 Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Menurut Mutiara (2021) ada tiga faktor penyebab kemiskinan, antara lain:

1. Kemiskinan yang disebabkan oleh mental seseorang, seperti yang memiliki sifat malas, penyakit dan cacat fisik yang menyebabkan seseorang tidak produktif (Mutiara, 2021). Faktor ini bukan semata-mata kesalahan individu, tetapi sering kali dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang tidak mendukung, seperti minimnya akses pendidikan dan layanan kesehatan. Ketika seseorang tidak memiliki kemampuan fisik atau mental yang memadai, maka peluang untuk keluar dari kemiskinan terbatas.
2. Kemiskinan disebabkan bencana alam. Bencana alam yang mengakibatkan rusaknya aset milik masyarakat seperti tempat tinggal, harta benda, serta gagal panen (Mutiara, 2021). Kemiskinan akibat bencana ini bersifat struktural dan tidak bisa disalahkan kepada individu, karena masyarakat menjadi miskin bukan karena tidak bekerja, tetapi karena kehilangan sumber daya yang sebelumnya menopang kehidupan mereka. Tanpa bantuan atau pemulihan yang memadai, kondisi ini dapat membuat masyarakat merasakan kemiskinan yang berkepanjangan.
3. Kemiskinan buatan. Kemiskinan ini disebabkan oleh beberapa hal yang bersifat struktural, diantaranya ketimpangan struktur ekonomi di mana struktur ekonomi dalam masyarakat tidak adil dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat. Kedua, struktur politik seperti rendahnya kualitas kebijakan pemerintah dalam menata struktur ekonomi negara. Ketiga, faktor budaya yang memberikan konsep pemikiran menerima takdir apa adanya (Mutiara, 2021). Kemiskinan jenis ini merupakan bentuk

kemiskinan yang paling kompleks karena tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga menyangkut sistem yang membatasi kesempatan masyarakat untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraannya.

2.3.3 Pengukuran Kemiskinan

Seseorang dapat dikatakan miskin apabila pengeluaran per kapita atau pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah pengeluaran konsumsi pangan untuk memenuhi energi minimum sebanyak 2.100 kalori per orang per hari atau berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yakni sebesar Rp. 609.160 per kapita per bulan.

Mengukur kemiskinan dapat melalui dua pendekatan yakni pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan rumah tangga menarik untuk digunakan dalam mengukur kesejahteraan rumah tangga. Rumus untuk pengukuran pendapatan adalah $\text{pendapatan} = \text{konsumsi} + \text{perubahan kekayaan bersih}$. Sedangkan untuk mengukur kemiskinan melalui pengeluaran konsumsi yakni meliputi barang dan jasa yang dibeli dan yang disediakan dari produksi sendiri (Haughton & Khandker, 2009).

2.4 Program Keluarga Harapan (PKH)

2.4.1 Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan atau yang disingkat dengan PKH merupakan program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka mengubah perilaku masyarakat miskin (Suwandi, 2024). Program ini mulai dilaksanakan sejak 2007 oleh Kementerian Sosial RI. Berdasarkan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018, PKH diberikan dalam bentuk bantuan tunai bersyarat kepada keluarga penerima manfaat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

PKH dipandang sebagai salah satu upaya strategis dalam memutus rantai kemiskinan melalui mekanisme intervensi berupa bantuan tunai

bersyarat. Bantuan ini ditujukan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat mereka memenuhi kewajiban seperti memanfaatkan layanan kesehatan serta memastikan anak-anak mereka mengakses pendidikan. Agar program ini berjalan optimal, dibutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten, sehingga implementasi program tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku KPM.

2.4.2 Tujuan PKH

Menurut Permensos (2018), berdasarkan Pemensos RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, tujuan dari Program Keluarga Harapan sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kehidupan Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan meningkatkan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

2.4.3 Komponen Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Kementerian Sosial RI 2018, Program Keluarga Harapan dirancang dengan beberapa komponen yang menargetkan kelompok rentan dalam keluarga miskin. Komponen ini mencakup kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, yang masing-masing memiliki persyaratan khusus bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

a. Komponen Kesehatan

Komponen kesehatan diperuntukkan bagi ibu hamil dengan maksimal dua kali kehamilan, ibu nifas, dan keluarga yang memiliki

anak usia (0 s/d 6 tahun). Keluarga penerima diwajibkan memeriksa kesehatan ibu hamil dan balita secara rutin di fasilitas kesehatan. Tujuan dari komponen ini adalah menekan angka kematian ibu dan anak, mencegah gizi buruk, serta menjamin tumbuh kembang anak yang optimal.

b. **Komponen Pendidikan**

Ditujukan untuk anak usia sekolah mulai dari tingkat dasar sampai dengan menengah keatas. Anak dari keluarga penerima berkewajiban untuk bersekolah dan memiliki tingkat kehadiran tertentu agar tetap memperoleh bantuan. Tujuan dari komponen ini untuk mencegah putus sekolah, meningkatkan partisipasi pendidikan, serta membuka peluang bagi generasi penerus keluarga miskin.

c. **Komponen Kesejahteraan Sosial**

Komponen ini diperuntukkan bagi keluarga yang memiliki maksimal satu orang penyandang disabilitas berat dan keluarga yang memiliki maksimal satu orang lansia. Tujuan ini dari komponen ini agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka meskipun dalam keterbatasan produktivitas (Rizal & Purnairawan, 2024).

2.4.4. Peran Pendamping dalam Membangun Kemandirian

Pendamping PKH memiliki peran yang penting dalam membantu masyarakat untuk mencapai kemandirian. Mereka berfungsi sebagai fasilitator, edukator, dan advokator dalam proses pendampingan mereka. Hal ini dikarenakan pendamping merupakan ujung tombak keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) karena mereka secara langsung bersentuhan dengan keluarga penerima manfaat di tingkat masyarakat.

Peran pendamping dapat diwujudkan dengan berbagai cara yakni fasilitasi, edukasi, dan advokasi untuk membangun kemandirian KPM, seperti membuka ruang diskusi, menyediakan fasilitasi, serta menjembatani terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, edukasi, dan motivasi. Maka, dengan adanya peran-peran tersebut, KPM

tidak hanya menjadi penerima pasif dari bantuan, melainkan ikut terlibat aktif dalam proses perubahan kondisi keluarga.

Kendati demikian, peran pendamping sering menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran KPM untuk berpartisipasi, keterbatasan sumber daya, maupun hambatan struktural dalam menghubungkan keluarga miskin dengan layanan sosial. Dengan demikian, peran pendamping PKH dalam membangun kemandirian masyarakat miskin bukan sekedar menyampaikan bantuan, tetapi bagaimana pendamping dapat mendorong KPM untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.5 Landasan Teori

2.5.1. Teori Struktural Fungsionalis Robert K. Merton

Teori struktural fungsionalis yang dikemukakan oleh Robert K. Merton merupakan salah satu perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang tersusun atas bagian-bagian dalam sistem sosial yang memiliki peran dan fungsi tertentu yang berkontribusi terhadap keberlangsungan, keteraturan, dan stabilitas masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak dipahami sebagai kumpulan individu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu kesatuan yang terorganisasi secara sistematis.

Dalam pandangan struktural fungsionalis, struktur sosial mencakup berbagai institusi, program, norma, nilai, serta aktor sosial yang menjalankan peran tertentu di dalam masyarakat. Struktur tersebut terbentuk untuk memenuhi kebutuhan tertentu dalam sistem sosial. Keberadaan suatu struktur dapat dijelaskan melalui fungsi yang dijalankannya bagi sistem sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, fokus struktural fungsionalis adalah pada fungsi sosial yakni konsekuensi atau dampak dari struktur atau aktivitas sosial terhadap sistem sosial (Adibah, 2017).

Robert K. Merton mengembangkan pendekatan fungsi struktural fungsionalis dengan memberikan kritik terhadap fungsionalisme klasik yang cenderung melihat masyarakat sebagai sistem yang harmonis. Merton menegaskan bahwa dalam kenyataan sosial, tidak semua struktur atau aktivitas sosial selalu memberikan dampak positif bagi sistem sosial. Oleh sebab itu, Merton membedakan fungsi sosial ke dalam beberapa kategori yakni fungsi manifes, laten, dan disfungsi.

Fungsi manifes merupakan konsekuensi yang disengaja oleh suatu struktur atau aktivitas sosial. Fungsi ini berkaitan dengan tujuan yang secara eksplisit ingin dicapai oleh suatu sistem. Sementara itu fungsi laten merupakan konsekuensi yang tidak disengaja dan tidak disadari, perlu diketahui bahwa fungsi laten seringkali tidak direncanakan, tetapi memiliki pengaruh nyata terhadap sistem sosial. Selain itu, konsep disfungsi merupakan konsekuensi negatif dari suatu struktur tau aktivitas sosial yang justru menghambat pencapaian tujuan sistem sosial atau mengganggu keseimbangan sistem. Merton menekankan bahwa fungsi-fungsi sosial tersebut dijalankan melalui peran-peran sosial yang melekat pada individu atau aktor dalam suatu struktur sosial. Aktor dalam masyarakat menempati status tertentu yang didalamnya melekat seperangkat peran yang harus dijalankan. Konsep ini dikenal sebagai *role set*, yakni kumpulan peran yang terkait dengan satu status sosial. Pelaksanaan peran-peran inilah yang menjadi mekanisme utama dalam menjalankan fungsi sosial dalam suatu struktur (Adibah, 2017).

Namun demikian, Merton juga menyatakan bahwa pelaksanaan peran tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Dalam praktiknya, individu atau aktor dapat mengalami ketegangan peran (*role strain*) atau menghadapi keterbatasan dalam menjalankan peran yang diharapkan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan fungsi laten yang tidak diinginkan atau disfungsi dalam sistem sosial. Oleh karena itu, dalam perspektif struktural fungsionalis Merton, peran sosial tidak hanya dipahami

sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai sumber keberhasilan atau kegagalan suatu struktur sosial dalam mencapai tujuan.

Dalam perspektif struktural fungsionalisme, keberlangsungan suatu sistem sosial ditentukan oleh sejauh mana setiap unsur di dalamnya mampu menjalankan fungsi yang telah ditetapkan. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai kebijakan sosial merupakan bagian sistem tersebut, yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka, untuk memastikan fungsi program dapat berjalan, diperlukan aktor sosial yang berperan sebagai penghubung antara kebijakan dan realitas sosial masyarakat. Dalam konteks ini, pendamping PKH menempati posisi strategis dalam struktur program. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana fungsi program dijalankan di tingkat lapangan, pendekatan teori peran Robert K. Merton digunakan sebagai turunan dari struktural fungsionalisme guna menganalisis perilaku, tuntutan, serta hambatan yang dihadapi oleh pendamping PKH.

2.5.2. Teori Peran dalam Perspektif Struktural Fungsionalis

Teori peran berangkat dari pemahaman bahwa setiap individu dalam masyarakat menempati satu status sosial, dan dari status inilah lahir seperangkat perilaku yang diharapkan atau disebut dengan peran sosial. Status merupakan posisi seseorang dalam struktur sosial, sedangkan peran merupakan seperangkat hak, kewajiban serta pola perilaku yang menyertai.

Merton kemudian memperkenalkan konsep *role set* untuk menggambarkan bahwa satu status sosial tidak hanya berkaitan dengan satu peran, melainkan terdiri dari sekumpulan peran yang dijalankan oleh individu dalam berinteraksi dengan berbagai pihak terkait. Menurut Merton (1957) *“The totality of roles associated with a single social status is what I call a role-set.”* Artinya, satu individu dapat menghadapi beragam harapan sosial yang datang dari berbagai sisi sekaligus. Konsep ini sangat penting dalam menjelaskan kompleksitas peran sosial di

masyarakat, di mana seseorang dituntut untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi yang berbeda.

Konsep *role set* ini lebih lanjut dijelaskan dalam artikel yang berjudul “*The Role-Set: Problems in Sociological Theory*”. Dalam tulisan tersebut, Merton menegaskan bahwa kompleksitas peran yang melekat pada status dapat menyebabkan mengalami konflik peran (*role conflict*) atau tekanan peran (*role strain*) seperti pernyataannya, “*The problems of role conflict and role strain arise when these multiple obligations cannot be simultaneously fulfilled.*” (Merton, 1957). Ketegangan peran muncul ketika individu mengalami kesulitan dalam memenuhi berbagai tuntutan peran yang datang secara bersamaan, baik akibat keterbatasan sumber daya, beban kerja, maupun tuntutan yang saling bertentangan.

Selain itu, dalam perspektif struktural fungsionalisme, pelaksanaan peran-peran sosial dapat menghasilkan fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes yang merupakan konsekuensi yang disengaja dan disadari dari suatu tindakan sosial, sedangkan fungsi laten merujuk pada konsekuensi yang tidak disengaja atau tidak disadari. Apabila peran sosial tidak dijalankan secara optimal, maka dapat muncul disfungsi, yaitu kondisi ketika peran justru menghambat tercapainya tujuan sistem sosial.

Dengan demikian, dalam perspektif struktural fungsionalis Robert K. Merton, peran-peran yang dijalankan oleh pendamping PKH tidak hanya dipahami sebagai serangkaian kewajiban normatif, tetapi juga sebagai mekanisme pelaksanaan fungsi sosial dalam suatu struktur sosial. Pelaksanaan peran tersebut dapat menghasilkan fungsi manifes, yaitu konsekuensi yang disengaja dan disadari, seperti terlaksananya kegiatan pendampingan dan tersalurkanya bantuan sesuai ketentuan. Selain itu, pelaksanaan peran pendamping juga dapat melahirkan fungsi laten, yakni konsekuensi yang tidak disengaja.

2.5.3. Peran Pendamping PKH dalam Perspektif Teori Peran

Berdasarkan teori peran Robert K. Merton, individu yang menempati suatu posisi sosial akan menjalankan serangkaian peran yang disertai dengan harapan sosial tertentu (*role expectation*). Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping menempati status sosial sebagai pelaksana program di tingkat lokal yang bertugas menghubungkan kebijakan pemerintah dengan realias sosial keluarga penerima manfaat. Dari status sosial tersebut, maka lahirlah *role set* yang mencakup berbagai peran yang harus dijalankan pendamping PKH. Peran tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan perubahan keluarga penerima menuju kemandirian.

Pendamping menjalankan peran fasilitator melalui kegiatan pertemuan kelompok, serta membuka akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Peran ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi serta keterlibatan aktif KPM dalam program. Selain itu, pendamping juga menjalankan peran sebagai edukator yakni memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban KPM, penyampaian materi, dan memberikan motivasi kepada KPM agar berproses pada kemandirian dan tidak bergantung pada bantuan. Pendamping turut membentuk pola pikir KPM agar bantuan dipahami sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi ekonomi, bukan hanya sebagai penghidupan jangka panjang. Berikutnya, peran advokator di mana pendamping membantu KPM dalam mengakses layanan administratif serta membantu pemenuhan hak-hak mereka dalam program. Pendamping berperan mendampingi KPM ketika menghadapi kendala administratif maupun kesulitan dalam memperoleh layanan sosial yang menjadi hak mereka.

Ketiga peran tersebut membentuk satu kesatuan yang disebut *role set* yang harus dijalankan pendamping PKH dalam struktur PKH. Kompleksitas peran ini berpotensi menimbulkan ketegangan peran atau

role strain, terutama ketika pendamping dihadapkan pada tuntutan administratif yang tinggi dan keterbatasan sumber daya di lapangan. Oleh karena itu, teori peran Robert K. Merton digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pendamping PKH menjalankan berbagai peran tersebut serta kendala yang dihadapi oleh pendamping PKH selama menjalankan peran.

2.6 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Faustina, dkk (2024) yang berjudul “Menggali Peran Pendamping Sosial dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi KPM PKH: Studi Kasus di Kelurahan Kebon Jayanti Kota Bandung” membahas mengenai peran pendamping sosial PKH dalam membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencapai kemandirian ekonomi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendamping sosial tidak hanya menjalankan peran administratif, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator membantu mengakses layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, edukator memberikan penyuluhan tentang pola kesehatan keluarga dan pengelolaan keuangan rumah tangga, representatif seperti menjadi penghubung antara KPM dan instansi terkait, dan pelaksana teknis seperti membantu proses pendataan, verifikasi, dan validasi data penerima.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling yang melibatkan 13 informan yang terdiri dari penanggung jawab PKH, perangkat kelurahan, pihak eksternal, dan KPM. Salah satu temuan penting adalah adanya hambatan dalam bentuk minimnya pemetaan sumber daya dan kurangnya akses pendamping terhadap jejaring di Kota Bandung yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi KPM.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini akan berfokus pada peran pendamping PKH di Kelurahan Rajabasa Jaya dalam mendorong kemandirian masyarakat miskin, dengan menggunakan kerangka *role theory* dari Robert K. Merton. Selain mengidentifikasi peran, penelitian ini

juga menganalisis bagaimana *role-set*, konflik peran, dan tekanan peran memengaruhi keberhasilan pendampingan dalam konteks PKH.

2. Berikutnya, penelitian oleh Fetni, dkk. (2025) yang mengkaji tentang “Peningkatan Kapasitas Keluarga Melalui Peran Pendamping PKH di Kabupaten Muna” membahas peran strategis pendamping PKH dalam mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat. Permasalahan yang diangkat adalah masih rendahnya kualitas hidup KPM meskipun telah menerima bantuan PKH. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, FGD, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH berperan sebagai fasilitator, edukator, representatif, dan pelaksana teknis. Peran ini terbukti meningkatkan kesadaran KPM dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sarana, prasarana, dan sosialisasi.

Kelebihan penelitian ini adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang peran pendamping PKH, sedangkan kelemahan terletak pada fokus yang masih terlalu luas sehingga kurang mendalam pada satu peran tertentu. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti terletak pada peneliti hanya menitikberatkan pada satu peran saja yakni fasilitator dalam mendorong kemandirian KPM di Kelurahan Rajabasa Jaya sehingga analisisnya lebih mendalam pada satu aspek peran pendamping.

3. Lebih lanjut penelitian oleh Aziz (2023) yang berjudul *"Peran Pendamping Sosial PKH dalam Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara"* membahas peran pendamping sosial dalam mendorong pemberdayaan KPM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH berperan sebagai fasilitator, motivator, dan edukator dalam proses pemberdayaan. Namun, terdapat kendala seperti

keterbatasan sarana prasarana, rendahnya tingkat pendidikan KPM, serta kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada peran pendamping PKH di Kelurahan Rajabasa Jaya dengan menitikberatkan pada analisis *role set* menurut Robert K. Merton. Fokus utama yakni mengidentifikasi bentuk-bentuk peran yang dijalankan, mengkaji konflik dan tekanan peran yang dihadapi, serta menganalisis kontribusi peran terhadap kemandirian KPM.

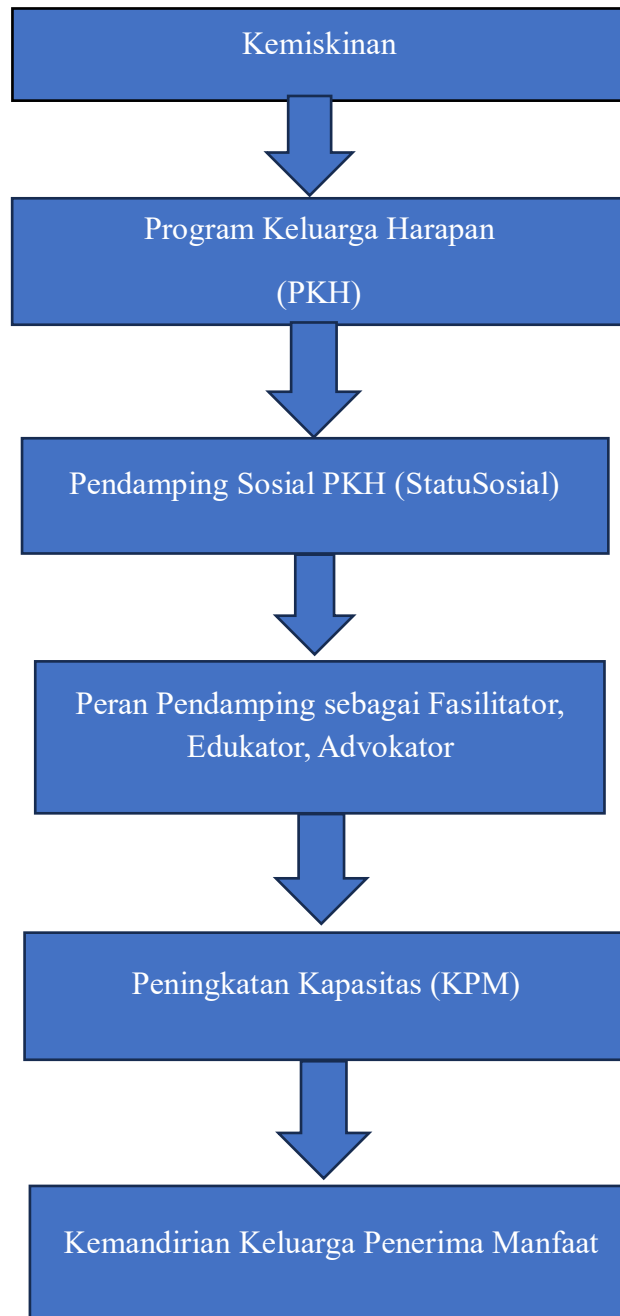
2.7 Kerangka Berfikir

Permasalahan utama yang ingin diselesaikan oleh peneliti adalah mengetahui bagaimana peran pendamping PKH sebagai fasilitator, edukator, advokator dalam menjalankan perannya untuk mendorong kemandirian masyarakat miskin. Peran pendamping menjadi kunci penting karena PKH tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan tunai bersyarat, tetapi juga intervensi sosial yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dalam konteks ini, pendamping PKH tidak hanya bertugas untuk menyalurkan bantuan, tetapi juga melakukan pembinaan, pemantauan, dan pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Namun, pada praktiknya, peran pendamping sering kali dihadapkan pada tantangan di lapangan, seperti beban kerja yang tinggi, keterbatasan sumber daya, serta ekspektasi yang beragam dari berbagai pihak. Hal ini dapat memunculkan berbagai dinamika yang kompleks. Menurut Robert K. Merton melalui konsep *role-set*, satu status sosial tidak hanya terkait dengan satu peran tunggal, melainkan mencakup sekumpulan peran yang harus dijalankan secara bersamaan. Kompleksitas ini dapat menimbulkan ketegangan peran seperti *role conflict* (konflik peran) dan *role strain* (tekanan peran) ketika tuntutan dari berbagai pihak bertentangan atau sulit dipenuhi secara bersamaan.

Dalam kerangka penelitian ini, teori peran digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk peran yang dijalankan pendamping PKH serta menganalisis sejauh mana peran tersebut berkontribusi terhadap proses kemandirian KPM.

Dengan memahami kedua hal ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pendampingan PKH sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.



Gambar 2. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, (2025)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif difokuskan pada proses, makna, serta pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena yang akan diteliti. Kualitatif merupakan data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka yang selanjutnya data dikumpulkan dalam beberapa cara seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut juga tidak bisa langsung diakses untuk analisis dan membutuhkan jangka waktu yang lama. Begitu juga dengan catatan lapangan yang perlu diperluas dan perlu adanya transkripsi (Miles et al., 2014). Peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk dapat memahami fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah yang dapat menggambarkan permasalahan pada seseorang mengenai sudut pandang perilaku.

Penelitian deskriptif kualitatif diartikan sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis satu atau beberapa hal yang dapat memberikan gambaran secara cermat mengenai keadaan serta gejala-gejala yang terjadi yang selanjutnya dikembangkan untuk menjadi sebuah bentuk penggambaran tertulis (Widiyani et al., 2021). Metode deskriptif sangat berguna dalam penelitian sosial karena memungkinkan peneliti untuk menemukan wawasan dan memahami kompleksitas fenomena sosial yang terjadi.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengikuti beberapa langkah yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Pertama peneliti menentukan informan berdasarkan dengan kriteria tertentu, kedua pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data di analisis melalui reduksi data, selanjutnya peneliti melakukan penyajian data yang menggambarkan kondisi lapangan secara nyata, terakhir peneliti menarik

kesimpulan berdasarkan dengan pola temuan yang muncul selama penelitian. Dengan demikian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Yang bertujuan untuk menggambarkan dan juga memahami peran sosial dari pendamping PKH dalam mendorong kemandirian masyarakat miskin.

3.2 Lokasi Penelitian

Menurut Creswell (2015) lokasi penelitian merupakan suatu tempat nyata yang secara langsung partisipan mengalami fenomena yang menjadi fokus penelitian. Pemilihan lokasi menjadi konteks alami untuk kegiatan pengambilan dan pengumpulan data karena pengalaman subjektif yang dimaknai oleh individu. Maka, penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Rajabasa Jaya, yang terletak di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Lokasi ini dipilih karena telah mempertimbangkan beberapa faktor penting yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu peran pendamping PKH dalam mendorong kemandirian masyarakat miskin.

Kelurahan Rajabasa Jaya merupakan salah satu kelurahan yang memiliki jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH yang cukup banyak dibandingkan dengan kelurahan lainnya di Kecamatan Rajabasa. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penerima bantuan sosial di wilayah ini masih cukup signifikan, sehingga peran pendamping PKH menjadi sangat penting dalam mengarahkan, membimbing, dan juga mengedukasi masyarakat agar dapat berproses menuju kemandirian.

Lokasi ini dipilih karena memiliki akses yang cukup terbuka terhadap pendamping PKH, serta terdapat dukungan dari pihak kelurahan untuk proses penelitian, termasuk kemungkinan untuk melakukan wawancara langsung dan observasi terbatas. Maka dengan demikian, Kelurahan Rajabasa Jaya dianggap representatif untuk menggambarkan bagaimana peran pendamping PKH dijalankan dalam konteks nyata di tingkat lokal.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran yang dijalankan pendamping PKH dalam upaya mendorong kemandirian masyarakat miskin di wilayah Kelurahan

Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggambarkan serta memahami secara mendalam bagaimana pendamping PKH menjalankan berbagai peran yang melekat pada status mereka. Peran-peran tersebut meliputi sebagai fasilitator, edukator, dan motivator.

Maka, fokus utama pada penelitian ini terletak pada proses pendampingan sebagaimana yang dialami, dipraktikkan, dan dimaknai oleh pendamping. Peneliti berupaya menangkap pengalaman pendamping dalam menjalankan dan menerima perannya, terutama pada bagaimana peran fasilitator, edukator, dan advokator dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin agar mereka dapat mandiri secara bertahap. Peneliti juga melihat dari sisi KPM, bagaimana KPM merasakan peran pendamping, serta bagaimana pandangan KPM terhadap pendampingan yang dilakukan oleh pendamping.

1. Memahami bagaimana pendamping PKH menjalankan peran:
 - a. Memfasilitasi KPM terhadap akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
 - b. Memberikan edukasi serta motivasi untuk mendorong pola pikir KPM.
 - c. Membantu KPM jika terdapat masalah yang tidak bisa dihadapi sendiri.
 - d. Mendampingi proses pembayaran KPM.
2. Mengidentifikasi KPM dalam proses menuju Kemandirian
 - a. Kemandirian Ekonomi.
 - b. Kemandirian Pengambilan Keputusan.
 - c. Pola pikir menuju kemandirian.
3. Mengidentifikasi dan mengetahui hambatan yang dihadapi pendamping PKH:
 - a. Kendala teknis seperti penyesuaian waktu dan tidak tersedianya alat media pendukung.
 - b. Hambatan sosial yang masih terdapat sebagian KPM memiliki partisipasi rendah.
 - c. Dukungan struktural yang terbatas (Tidak adanya pelatihan UMKM).

3.4 Informan Penelitian

Menurut John W. Creswell, dalam penelitian kualitatif, informan merupakan individu yang memiliki pengalaman langsung terhadap fenomena yang sedang diteliti dan dapat membantu memberikan informasi yang bermakna mengenai pengalaman tersebut. Maka dalam penelitian ini, informan tidak dipilih berdasarkan jumlah yang besar melainkan pada kedalaman pemahaman yang dimiliki oleh informan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik *Purposive*. *Purposive* digunakan pada saat teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap mengetahui dan paham tentang sebuah fenomena yang akan diteliti atau orang yang paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan sehingga memudahkan peneliti untuk mendalami situasi sosial tertentu. Selain itu, tujuan dari *purposive* ini adalah untuk menjelaskan suatu permasalahan yang secara jelas karena sampel mewakili memiliki nilai representatif, sehingga tujuan utama penelitian dapat terpenuhi.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendamping PKH: Sebagai informan utama yang terdaftar sebagai pendamping aktif, memiliki pengalaman dalam melakukan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat, serta bersedia untuk diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Keluarga penerima manfaat PKH: Adapun kriteria sebagai berikut, terdaftar secara resmi sebagai penerima PKH aktif, mengikuti program PKH, serta dapat memberikan informasi mengenai bentuk pendampingan yang diterima.
3. Pihak Kelurahan: Sebagai informan pendukung untuk mengetahui bagaimana pandangan pihak kelurahan terhadap peran yang dilaksanakan oleh pendamping PKH.
4. Non-PKH: Informan pendukung yang memberikan informasi mengenai pandangan mengenai program keluarga harapan serta peran yang dijalankan oleh pendamping PKH.

3.5 Sumber Data

Berikut dua sumber data yang digunakan oleh peneliti, yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui interaksi secara langsung dengan informan. Menurut Sugiyono (2023) data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung baik melalui wawancara maupun observasi. Dalam penelitian ini informan adalah orang-orang yang memberikan informasi tentang fakta, pendapat, atau informasi lainnya secara lisan. Peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah dirancang sebelumnya untuk mengumpulkan data primer.

Data primer dalam penelitian ini mencakup informasi mengenai bentuk peran pendamping, interaksi dengan KPM, tantangan yang dihadapi, serta pandangan informan mengenai pendamping PKH. Berdasarkan pengalaman langsung dan opini dari informan yang terlibat serta penerima kebijakan, data primer memberikan informasi yang akurat dan kontekstual. Seluruh data primer diperoleh melalui wawancara tatap muka secara langsung di lokasi penelitian. Peneliti mendapatkan sumber data primer dari informan langsung yaitu Pendamping PKH di Kelurahan Rajabasa Jaya dan KPM yang berada di Kelurahan Rajabasa Jaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung data primer yang telah diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan. Menurut Sugiyono (2023) data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian, melainkan diperoleh dari dokumen, arsip, atau buku yang mendukung keabsahan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen resmi, kegiatan PKH, peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan PKH, literatur berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Ketersediaan data sekunder yang komprehensif dan relevan dapat meningkatkan cara temuan penelitian yang memperluas interpretasi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell (2015), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merujuk pada metode atau strategi yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi relevan dalam suatu penelitian. Maka, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dalam memperoleh data informan diantaranya adalah observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi.

a. Observasi

Menurut Creswell (2015) observasi dalam penelitian kualitatif adalah proses sistematis di mana peneliti mengamati perilaku, tindakan, serta interaksi partisipan dalam konteks yang alami untuk memahami fenomena yang diteliti. Catatan lapangan akan dibuat untuk merekam temuan yang muncul selama observasi. Maka, teknik memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika sosial yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara.

Dalam penelitian ini, observasi akan dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana pendamping PKH dalam menjalankan peran. Peneliti akan melihat bagaimana bentuk kegiatan yang dilakukan, seperti adanya pertemuan kelompok, membantu dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, dan memberikan ruang untuk berdiskusi. Observasi juga mencakup tingkat partisipasi KPM dalam kegiatan yang dijalankan. Observasi dilakukan pada saat pendamping melakukan pertemuan kelompok dengan KPM, aktivitas yang dilakukan pendamping di lapangan, kegiatan interaksi antara pendamping dan keluarga penerima. Untuk memperjelas aspek pengamatan, berikut disajikan ringkasan fokus observasi penelitian. difasilitasi. Hasil observasi akan digunakan sebagai data yang kontekstual untuk memperkaya informasi yang diperoleh dari hasil wawancara.

Tabel 3. Hasil Observasi

No	Aspek yang Diamati	Hasil Observasi
1.	Aktivitas Pendamping di Lapangan	Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama proses penelitian di Kelurahan Rajabasa Jaya, kegiatan pendamping PKH tergolong aktif dan teorganisir. Pendamping melakukan kunjungan kerumah warga sekitar untuk sekedar bersilaturahmi dan bertanya terkait bantuan serta pertemuan kelompok yang rutin dilakukan. Pendamping juga berdiskusi dengan koordinator PSM dan pihak kelurahan mengenai warganya yang menerima bantuan. Selain itu, pada pertemuan kelompok, pendamping membangun komunikasi yang aktif dengan penerima dan membangun suasana yang nyaman supaya penerima manfaat nyaman dengan pertemuan tersebut. Pendamping juga merespon pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh penerima manfaat. Hasil observasi menunjukkan bahwa pendamping begitu aktif dalam melayani peserta binaannya dan pendamping juga sangat komunikatif terhadap peserta binaannya.
2.	Partisipasi dan Respon Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Hasil observasi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi KPM di Kelurahan Rajabasa Jaya tergolong baik, meskipun masih terdapat beberapa anggota yang tidak hadir, namun secara keseluruhan KPM yang hadir mengikuti dengan baik kegiatan pertemuan ini. Walaupun masih ada beberapa juga yang pasif dan hanya diam saja mendengarkan tetapi sebagian dari mereka yang hadir aktif bertanya dan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh pendamping. Pada pertemuan kelompok tersebut terlihat adanya interaksi aktif positif antara pendamping dengan KPM. Pada saat observasi di lapangan terlihat bahwa

		hubungan antara pendamping dan KPM cukup dekat dan humanis.
3.	Bentuk Interaksi dan Pendekatan Sosial Pendamping dengan KPM	Selama kegiatan observasi, peneliti memperhatikan hubungan antara pendamping dengan KPM. Peneliti melihat bahwa hubungan antara pendamping dengan KPM cukup dekat. Dalam kegiatan pertemuan kelompok tersebut, pendamping menjadi figur yang memberikan dukungan moral serta menjadi tempat curahan hati pada peserta binaannya. Pendamping juga menyesuaikan gaya bahasa dengan kondisi sosial peserta binaannya supaya pesan yang disampaikan mudah dipahami.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab di mana ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam percakapan, yang salah satu pihak berperan sebagai pewawancara dan pihak lain sebagai pihak yang diwawancarai untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan persepsi subjek penelitian (Creswell, 2015). Wawancara dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya; wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data setelah peneliti mengetahui informasi pengumpulan data yang akan digunakan. Wawancara semi terstruktur untuk memahami situasi di mana pihak yang diwawancarai memberikan informasi dan memberikan ide-idenya. Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang bersifat bebas dan tidak memerlukan pedoman wawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara sebagai teknik utama dalam menggali informasi dari informan yang dipilih secara *purposive*. Teknik wawancara ini bersifat semi-terstruktur, sehingga peneliti memiliki panduan umum namun tetap memberikan ruang terbuka bagi informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk sumber tertulis, gambar, ataupun sumber lainnya untuk melengkapi informasi peneliti dalam proses penelitian (Creswell, 2015).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data sekunder yang mendukung dan melengkapi hasil wawancara dan observasi. Data yang diambil meliputi dokumen resmi terkait PKH, laporan kegiatan, foto kegiatan, serta dokumen lain yang menjadi pendukung penelitian. Analisis terhadap dokumen ini membantu peneliti dalam memahami kerangka kebijakan yang digunakan dalam evaluasi, serta menilai apakah pelaksanaan di lapangan sesuai dengan dokumen resmi yang berlaku. Selain itu, data dokumenter dapat digunakan dengan membandingkan pernyataan informan dengan fakta tertulis yang ada.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengolah data sehingga data yang dihasilkan memperoleh hasil yang akurat. Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Secara umum analisis data terdiri dari tiga alur, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*Conclusion drawing/verifying*) (Miles et al., 2014)

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, menyederhanakan, serta memfokuskan data yang diperoleh dari lapangan agar sesuai dengan fokus penelitian. Proses ini akan berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti.

Pada penelitian ini, peneliti akan memilah data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian, yakni mengenai bagaimana peran pendamping menjalankan perannya sebagai fasilitator, edukator, dan advokator guna mendorong kemandirian masyarakat miskin. Misalnya, tentang bagaimana pendamping memfasilitasi pertemuan kelompok, menggali potensi keluarga penerima manfaat, menghubungkan KPM dengan layanan pendidikan dan kesehatan, serta memastikan bantuan diterima tepat sasaran, Informasi yang bersifat tidak relevan atau adanya pengulangan akan dieliminasi agar tidak mengganggu kejelasan analisis. Tahapan ini akan membantu peneliti untuk mulai membangun kategori atau tema dari data yang telah diperoleh.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang akan disusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Bentuk penyajian data dari kualitatif dapat berupa teks naratif yang berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang telah disusun dalam suatu bentuk yang nantinya mudah diraih, sehingga memudahkan untuk penarikan kesimpulan.

Pada penelitian ini, setelah data di reduksi maka langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang sistematis agar mudah dipahami dan dapat dianalisis lebih lanjut. Penyajian data ini dapat berupa matriks, tabel, narasi deskriptif, atau model hubungan antar variabel. Tahapan ini membantu peneliti mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan keterkaitan yang muncul dari data.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Upaya penarikan Kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama di lapangan. Peneliti mulai mencari arti dari benda-benda, mencatat keteraturan pola secara teoritis, penjelasan, konfigurasi, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan ini terus menerus dilakukan agar Kesimpulan menjadi lebih rinci dan mengakar. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama

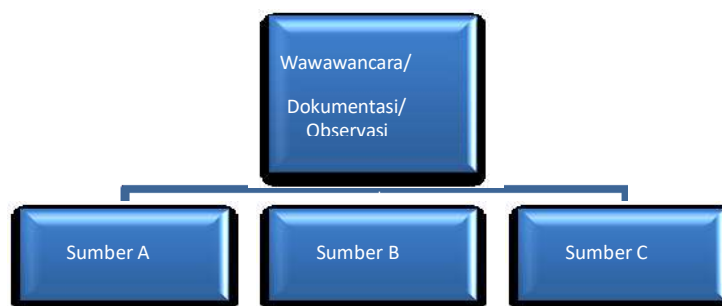
penelitian, dengan cara memikirkan ulang selama penelitian, melakukan tinjauan ulang catatan lapangan, dan upaya yang luas untuk menempatkan Salinan suatu temuan dalam seperangkat data.

Pada tahap ini, peneliti harus menarik kesimpulan yang bersifat interpretatif, namun harus didasarkan pada bukti-bukti empiris yang kuat dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Verifikasi akan dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung untuk menjaga validitas data. Peneliti akan merumuskan jawaban dari rumusan masalah serta menjelaskan makna dari hasil penelitian.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Penelitian kualitatif terdapat delapan teknik yang bisa digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yakni: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, analisis kasus negatif, dan pengecekan anggota. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data peneliti. Creswell (2015) menyatakan bahwa pentingnya melakukan triangulasi sebagai teknik utama dalam meningkatkan validitas internal dalam studi kualitatif.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta didukung oleh data regulasi dan observasi. Triangulasi sumber dipilih karena topik peran pendamping PKH dalam mendorong kemandirian masyarakat melibatkan *multiple stakeholders* dengan perspektif yang berbeda namun saling berhubungan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari pendamping PKH, keluarga penerima manfaat, masyarakat non-penerima PKH, serta pihak kelurahan. Informasi mengenai peran yang diperoleh dari pendamping dan KPM kemudian dibandingkan dengan pandangan masyarakat non-penerima manfaat serta pihak kelurahan untuk melihat kesesuaian dan konsistensi data.



Gambar 3. Cara melakukan triangulasi sumber

Hasil triangulasi menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari pendamping PKH, KPM, maupun dokumen resmi program memiliki tingkat konsistensi yang cukup. Informasi dari pendamping mengenai pelaksanaan peran baik dalam pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial sesuai dengan pengalaman yang diceritakan KPM. Data dokumen seperti Permensos No. 1 Tahun 2018 Pasal 49, juga memperkuat bahwa praktik pendamping di Rajabasa Jaya sudah selaras dengan regulasi. Dengan demikian, hasil triangulasi ini dapat meningkatkan keabsahan data sesuai dengan informasi yang telah didapatkan peneliti.

Tabel 4. Hasil Triangulasi Sumber

Kategori	Hasil Triangulasi
Peran Pendamping PKH	Pendamping telah menjalankan peran sebagai fasilitator, edukator, dan advokator. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan pendamping mengenai pelaksanaan pertemuan kelompok, kunjungan, dan sebagai edukator yang kemudian didukung oleh pernyataan KPM mengenai bantuan akses pendidikan dan kesehatan, serta hasil observasi peneliti yang menunjukkan keaktifan pendamping dalam membimbing peserta binaan.
Kemandirian KPM	Kemandirian KPM tercermin pada aspek ekonomi dan pengambilan keputusan. Triangulasi menunjukkan adanya kesesuaian antara motivasi yang diberikan pendamping dengan realita lapangan, di mana KPM memiliki usaha sendiri. Kemudian, data ini diperkuat dengan adanya KPM yang telah melakukan graduasi mandiri.

Hambatan Pendampingan	Ditemukan adanya hambatan yang dihadapi selama proses pendampingan. Hasil wawancara dengan pendamping, KPM, dan pihak Kelurahan menunjukkan konsistensi data bahwa keterbatasan media sosialisasi, rendahnya partisipasi KPM, dan belum tersedianya pelatihan UMKM yang menjadi faktor penghambat optimalisasi program.
--------------------------	---

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis dan Kondisi Wilayah

4.1.1 Sejarah Singkat Kelurahan Rajabasa

Berdasarkan Profil Kelurahan Rajabasa Jaya Tahun 2025, Kelurahan Rajabasa Jaya merupakan salah satu kelurahan yang baru terbentuk di Kota Bandar Lampung. Sebelum menjadi kelurahan mandiri, wilayah ini merupakan bagian dari Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Kedaton, yang mencakup Kampung Sukajaya, Kampung Sumberejo, Kampung Lingsuh, Kampung Bayur, dan Kampung Sinar Harapan.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat, dilakukan pemekaran menjadi dua lingkungan, yaitu Lingkungan I yang meliputi Kampung Sukajaya dan Kampung Sumberejo, serta Lingkungan II yang mencakup Kampung Lingsuh, Kampung Bayur, dan Kampung Sinar Harapan. Pemekaran ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2001 tentang penghapusan, pembentukan, dan penggabungan kecamatan serta kelurahan, yang menetapkan wilayah tersebut sebagai kelurahan baru bernama Kelurahan Rajabasa Jaya di bawah Kecamatan Rajabasa dengan perangkat pemerintahan tersendiri. Sejak resmi berdiri, kelurahan ini pertama kali dipimpin oleh M. Helmi, S.H. pada Desember 2001 hingga Mei 2003, dan hingga tahun 2024 telah mengalami sembilan kali pergantian lurah, dengan Agus Purwanto, S.Sos. menjabat sejak 20 Maret 2024 sampai sekarang (Kelurahan Rajabasa Jaya, 2025).

Maka, dalam perkembangannya, kelurahan ini membagi wilayahnya ke dalam dua lingkungan yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan

serta koordinasi antara aparat kelurahan dengan masyarakat. Dari dua lingkungan tersebut kemudian dibentuk unit-unit yang lebih kecil berupa Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang hingga kini terus menjadi struktur pemerintahan terdepan dalam menjembatani dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tabel 5. Wilayah Kelurahan Rajabasa Jaya

Wilayah	Kampung
Lingkungan I	Kampung Sukajaya dan Kampung Sumberejo
Lingkungan II	Kampung Lingsuh, Kampung Bayur dan Kampung Sinar Harapan

Sumber: Kelurahan Rajabasa Jaya, 2025

4.1.2 Luas Wilayah

Berdasarkan dokumen Profil Kelurahan Rajabasa Jaya tahun 2025. Kelurahan Rajabasa Jaya memiliki luas wilayah sekitar 359 hektar, dengan tipologi wilayah berupa persawahan. Luas tersebut menjadikan Rajabasa Jaya sebagai salah satu kelurahan dengan area yang cukup besar di Kecamatan Rabajasa. Secara administratif, wilayah Kelurahan Rajabasa Jaya berbatasan dengan beberapa desa dan kelurahan lain. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Fajar Baru, sementara di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Rajabasa Raya. Di bagian barat, kelurahan ini dibatas oleh Sungai Way Kandis. Sedangkan di sebelah timur, Rajabasa Jaya berbatasan dengan Kelurahan Labuhan Dalam. batas-batas geografis ini tidak hanya menunjukkan letak administratif kelurahan, tetapi juga menghubungkan Rajabasa Jaya dengan aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dari wilayah sekitarnya. Dengan demikian, Rajabasa Jaya menjadi wilayah yang cukup strategis, baik itu dari sisi mobilitas penduduk dalam interaksi antarwilayah.

4.1.3 Kondisi Geografis dan Topografi

Secara geografis, Kelurahan Rajabasa Jaya berada pada Kawasan yang relatif datar. Berdasarkan data Kelurahan Rajabasa Jaya Tahun 2025, di wilayah ini masih terdapat lahan persawahan. Kondisi topografi yang datar pada dasarnya mendukung kegiatan pertanian karena memudahkan pengolahan lahan serta sistem irigasi. Namun, seiring dengan perkembangan wilayah terjadi perubahan pemanfaatan ruang di Kelurahan Rajabasa Jaya. Hal ini berdampak pada berkurangnya luas lahan pertanian karena sebagian lahan beralih fungsi menjadi kawasan perumahan. Meskipun lahan persawahan masih ada, keberadaannya tidak menjadi sektor utama dalam struktur ekonomi masyarakat.

Perubahan kondisi tersebut terlihat dari data mata pencaharian penduduk. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani sebesar 0,55%. Angka ini menunjukkan bahwa sektor pertanian bukan lagi menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Sedangkan, profesi yang paling banyak digeluti adalah buruh dengan persentase 35,33%. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian ke non pertanian. Dengan demikian, meskipun kondisi geografis masih memungkinkan adanya kegiatan pertanian namun masyarakat telah mengalami perubahan orientasi pekerjaan.

Selain itu, Kelurahan Rajabasa Jaya juga memiliki unsur geografis berupa Sungai Way Kandis. Keberadaan Sungai ini masih dimanfaatkan oleh warga setempat serta mendukung sistem irigasi pada lahan yang masih difungsikan untuk pertanian. Namun demikian, kondisi geografis dan topografi Kelurahan Rajabasa Jaya menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor fisik wilayah dan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Walaupun secara geografis wilayah ini memiliki potensi pertanian perkembangan wilayah menyebabkan terjadinya pergeseran mata pencaharian.

4.2 Kondisi Demografis

4.2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator yang penting untuk memahami dinamika dalam suatu wilayah, karena dari data kependudukan inilah dapat diketahui beban pembangunan, kebutuhan pelayanan dasar, serta arah kebijakan sosial yang perlu diterapkan oleh pemerintah. Maka, berdasarkan data monografi tahun 2025, jumlah penduduk di Kelurahan Rajabasa Jaya mencapai 12.471 jiwa. Dari jumlah data tersebut, terhitung terdapat 6.320 jiwa merupakan laki-laki dan 6.151 jiwa merupakan perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa perbandingan antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang, meskipun jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dari jumlah perempuan. Kesetaraan jumlah ini menjadi cerminan bahwa struktur kependudukan Rajabasa Jaya tidak mengalami ketimpangan jenis kelamin.

Selain jumlah penduduk, aspek lain yang tidak kalah penting yakni kepala keluarga (KK) yang ada di wilayah ini. Tercatat terdapat 3.615 KK tinggal di Rajabasa Jaya, dengan 3.070 KK dipimpin oleh laki-laki dan 545 KK dipimpin oleh perempuan. Berdasarkan data yang dipaparkan, menunjukkan bahwa meskipun mayoritas rumah tangga masih dipimpin oleh laki-laki, namun keberadaan keluarga yang dikepalai oleh perempuan masih cukup signifikan. Hal ini seringkali berhubungan dengan kondisi sosial tertentu, seperti janda yang menjadi penanggung jawab sebuah keluarga, atau perempuan yang harus mengambil peran menjadi kepala keluarga karena suaminya bekerja di tempat yang jauh. Fenomena ini menunjukkan adanya variasi struktur keluarga yang turut mewarnai dinamika sosial masyarakat Rajabasa Jaya.

Jika dilihat dari luas wilayah, Kelurahan Rajabasa Jaya memiliki luas wilayah sekitar 359 hektar. Dengan jumlah penduduk cukup tinggi, yakni lebih dari tiga ribu jiwa per kilometer persegi. Kepadatan ini memberikan gambaran bahwa meskipun kelurahan ini masih memiliki

lahan persawahan sebagai ciri khas tipologi wilayah, tekanan terhadap lahan permukiman juga semakin besar. Pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup pesat dalam kurun waktu dua dekade terakhir mendorong terjadinya alih fungsi lahan, dari lahan pertanian menjadi area hunian dan fasilitas umum. Dengan demikian, gambaran jumlah penduduk Kelurahan Rajabasa Jaya menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki jumlah penduduk cukup banyak dengan komposisi jenis kelamin serta jumlah kepala keluarga yang cukup banyak. Kondisi tersebut, menggambarkan adanya dinamika sosial yang terus berkembang. Data kependudukan ini menjadi dasar untuk memahami karakteristik masyarakat Rajabasa Jaya secara umum.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Kelurahan Rajabasa Jaya

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	50,65%
2	Perempuan	49,35%
Jumlah		100%

Sumber: Kelurahan Rajabasa Jaya, 2025

4.2.2 Usia Penduduk

Usia penduduk merupakan salah satu aspek penting karena dapat memberikan gambaran mengenai komposisi usia masyarakat serta implikasinya terhadap pembangunan. Berdasarkan data monografi Kelurahan Rajabasa Jaya tahun 2025, jumlah penduduk Rajabasa Jaya mencapai 12.471 jiwa. Dengan terbagi ke dalam beberapa kategori, seperti Penduduk usia dini, yakni kelompok usia 0-14 tahun mencapai jumlah yang cukup besar sekitar 17,77%. Angka ini menunjukkan bahwa Rajabasa Jaya masih memiliki ketergantungan beban anak yang cukup tinggi, karena pada rentang usia ini mayoritas penduduk masih membutuhkan layanan pendidikan, kesehatan, dan dukungan keluarga. Kehadiran kelompok usia anak ini juga menandakan pentingnya

keberadaan fasilitas pendidikan dasar seperti PAUD, TK, dan SD yang tersedia di kelurahan.

Sementara itu, kelompok usia produktif merujuk pada klasifikasi demografi menurut Badan Pusat Statistik, yakni individu yang berusia 15-64 tahun. Jika dirinci, kelompok usia 15-19 tahun tercatat sebanyak 9,61%, usia 20-24 tahun sebanyak 9,78%, usia 25-29 tahun sebanyak 10,17%, serta kelompok usia 30-34 tahun sebanyak 9,39%. Data ini menunjukkan bahwa populasi usia muda dewasa mendominasi, terutama pada rentang 20-29 tahun yang merupakan fase awal seseorang memasuki dunia kerja. Kemudian usia 40-49 tahun, juga cukup signifikan jumlahnya, yakni 17,45%. Kelompok ini biasanya memiliki posisi sebagai tulang punggung keluarga dalam hal ekonomi, sehingga keberadaan mereka dianggap sangat penting dalam menopang kesejahteraan rumah tangga.

Kemudian, merujuk pada klasifikasi WHO, usia 60 tahun keatas dikategorikan sebagai kelompok lanjut usia (lansia) yang jumlahnya mencapai 3,73%. Walaupun proporsinya kecil dibandingkan kelompok usia lain, keberadaan lansia tetap perlu mendapat perhatian, terutama terkait dengan kebutuhan kesehatan dan dukungan sosial. Dalam banyak kasus, lansia di tingkat kelurahan sering bergantung pada keluarga inti, sehingga kesejahteraan mereka sangat ditentukan oleh kondisi ekonomi rumah tangga tempat mereka tinggal.

Dengan demikian, struktur umur penduduk Rajabasa Jaya dapat disimpulkan masih didominasi oleh usia produktif. Hal ini memberikan potensi demografis yang besar karena mayoritas penduduk berada pada usia kerja.

Tabel 7. Data Usia Penduduk Kelurahan Rajabasa Jaya

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	00-04	1,89%	1,88%	3,77%
2	04-09	3,03%	3,12%	6,15%
3	10-14	4,02%	3,83%	7,85%
4	15-19	5,15%	4,46%	9,61%
5	20-24	5,08%	4,69%	9,78%
6	25-29	5,27%	4,91%	10,17%
7	30-34	4,79%	4,60%	9,39%
8	35-39	4,52%	4,19%	8,71%
9	40-44	4,38%	4,35%	8,74%
10	45-49	4,29%	4,75%	9,05%
11	50-54	3,93%	3,63%	7,56%
12	55-59	2,84%	2,65%	5,49%
13	60+ Th	1,48%	2,25%	3,73%
Jumlah		50,68%	49,32%	100%

Sumber: Kelurahan Rajabasa Jaya, 2025

4.2.3 Agama Penduduk

Perlu diketahui bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga berperan besar dalam membentuk pola interaksi sosial, nilai budaya, serta kegiatan masyarakat. Berdasarkan data monografi tahun 2025, penduduk Kelurahan Rajabasa Jaya Sebagian besar menganut agama Islam, dengan persentase sebesar 97,48%. Selain Islam sebagai agama mayoritas, terdapat pula pemeluk agama lain meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Penduduk beragama Kristen tercatat sebanyak 1,15%. Kemudian diikuti Katolik sebanyak 0,43%, dan Hindu sebanyak 0,94%.

Meskipun jumlahnya tidak besar, keberadaan mereka memberikan keragaman sosial yang ada di wilayah ini. Keberagaman ini mencerminkan adanya pluralitas dalam masyarakat, di mana masyarakat dengan latar belakang keagamaan yang berbeda dapat hidup berdampingan. Tidak adanya laporan konflik antar agama dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa masyarakat Rajabasa Jaya mampu menjaga toleransi dan menghormati perbedaan keyakinan yang ada.

Tabel 8. Data Agama Penduduk

No	Agama Yang Dianut	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	49,38%	48,10%	97,48%
2	Kristen	0,60%	0,55%	1,15%
3	Khatolik	0,20%	0,22%	0,43%
4	Hindu	0,50%	0,45%	0,94%
5	Buddha	0%	0%	0%
Jumlah		50,68%	49,32%	100%

Sumber: Kelurahan Rajabasa Jaya, 2025

4.2.4 Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Rajabasa Jaya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat berada pada jenjang pendidikan menengah, terutama SLTA dan SLTP. Data menunjukkan bahwa kelompok yang berpendidikan lulusan SLTP sebesar 24,91%, sedangkan lulusan SLTA sebesar 24,80%. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur pendidikan masyarakat didominasi oleh lulusan pendidikan menengah.

Kemudian, untuk penduduk yang menamatkan pendidikan SD masih cukup besar, data menunjukkan sebesar 21,37% yang menamatkan sekolah dasar (SD). Hal ini mencerminkan bahwa masih banyak terdapat kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya relatif rendah. Selain itu, faktor ekonomi menjadi penyebab utama, di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu lebih banyak diarahkan untuk membantu orang tua bekerja daripada melanjutkan sekolah. Hal ini juga

bisa memengaruhi oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Untuk kelompok yang menempuh pendidikan Sarjana mencapai 11,68%, sedangkan untuk yang menempuh pendidikan Diploma mencapai 13,53%. Meskipun jumlahnya tidak dominan, tetapi kelompok pendidikan tinggi menunjukkan bahwa adanya mobilitas sosial yang positif serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Namun, jika dilihat dari persentase yang tidak terlalu besar memperlihatkan bahwa kesempatan mengenyam dunia pendidikan tinggi masih sangat terbatas. Dengan demikian, jika dilihat secara keseluruhan, data pendidikan ini memberikan gambaran bahwa Kelurahan Rajabasa Jaya memiliki keragaman tingkat pendidikan, namun masih didominasi oleh tingkat pendidikan menengah. Kondisi ini turut memengaruhi peluang kerja, tingkat pendapatan, dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Tabel 9. Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sarjana	5,98%	5,70%	11,68%
2	Diploma	7,14%	6,40%	13,53%
3	SLTA	12,41%	12,39%	24,80%
4	SLTP	12,67%	12,24%	24,91%
5	SD	10,60%	10,77%	21,37%
6	TK	1,06%	1,19%	2,25%
7	Belum Sekolah	0,82%	0,63%	1,45%
Jumlah		50,68%	49,32%	100%

Sumber: Kelurahan Rajabasa Jaya, 2025

4.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

4.3.1 Mata Pencaharian Penduduk

Pekerjaan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk memahami kondisi sosial dan ekonomi di suatu wilayah. Jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat akan berpengaruh langsung terhadap tingkat pendapatan rumah tangga, pola konsumsi, serta kesejahteraan keluarga. Demikian pada Kelurahan Rajabasa Jaya, jenis pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat sangat beragam, meskipun masih didominasi oleh sektor informal. Sektor informal merupakan aktivitas ekonomi yang mudah dimasuki serta umumnya dijalankan secara mandiri. Usaha pada sektor ini pendapatannya tidak selalu stabil. Kelompok ini meliputi buruh, pedagang, dan penyedia jasa yang bekerja tanpa jaminan sosial (Khairi et al., 2022).

Berdasarkan data pada tahun 2025, jumlah terbesar penduduk Rajabasa Jaya bekerja sebagai buruh, yakni mencapai 35,33%. Profesi ini mencakup berbagai jenis buruh, mulai dari buruh harian lepas, buruh bangunan, hingga buruh pabrik. Selain buruh, jumlah penduduk yang bekerja sebagai pedagang juga cukup besar yakni mencapai 7,47%. Aktivitas perdagangan di Rajabasa Jaya umumnya masih dalam skala kecil, seperti berdagang di pasar tradisional, membuka warung, kios, maupun secara berkeliling. Walaupun skalanya terbatas, sektor perdagangan menjadi penopang dalam kehidupan ekonomi masyarakat, karena selain menghasilkan pendapatan, perdagangan juga menyesuaikan kebutuhan pokok bagi masyarakat sekitar.

Kemudian, jenis pekerjaan lain yang cukup menonjol adalah sektor jasa dan tukang, yang jumlahnya mencapai 5,35%. Pekerjaan ini meliputi tukang bangunan, tukang ojek, mekanik, dan berbagai jasa keterampilan lainnya. Kelompok pekerja jasa memiliki peran penting karena menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari. Berdasarkan data, terdapat 2,24% yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1,16% anggota TNI/Polri, dan 2,12% sudah

memasuki masa pensiun. Kelompok ini dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan lebih stabil, karena mendapatkan penghasilan tetap dan jaminan sosial yang relatif lebih baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa orang yang belum dan atau tidak bekerja. Menurut data sekitar 20,11% yang belum dan atau tidak bekerja. Kelompok ini terdiri atas pelajar, rumah tangga, dan individu yang sedang mencari pekerjaan. Secara keseluruhan, kondisi mata pencaharian penduduk Rajabasa Jaya memperlihatkan bahwa sektor informal masih menjadi tumpuan utama masyarakat. Tingginya jumlah buruh, pedagang kecil, dan pekerja jasa menunjukkan bahwa masyarakat masih bergantung pada pekerjaan dengan penghasilan rendah dan tidak menentu.

Tabel 10. Data Pekerjaan Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	1,32%	0,92%	2,24%
2	Tni / Polri	0,81%	0,35%	1,16%
3	Dagang	4,10%	3,38%	7,47%
4	Tani / Buruh Tani	0,31%	0,24%	0,55%
5	Tukang /Jasa	3,49%	1,85%	5,35%
6	Buruh	27,62%	7,71%	35,33%
7	Pensiunan	1,23%	0,89%	2,13%
8	Belum / Tidak Berkerja	9,60%	10,51%	20,11%
9	Lain-Lain	3,51%	24,38%	27,90%
Jumlah		50,68%	49,32%	100%

Sumber: Kelurahan Rajabasa Jaya, 2025

4.3.2 Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh masyarakat di banyaknya wilayah, termasuk di Kelurahan Rajabasa Jaya. Tingginya jumlah penduduk miskin menjadi tantangan tersendiri karena berimplikasi pada terbatasnya kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik berupa makanan, kesehatan, dan pendidikan. Kondisi ini sekaligus menjadi faktor penting dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data monografi 2025, jumlah penduduk miskin di wilayah ini mencapai 2.740 jiwa dari total 12.471 jiwa penduduk. Jika dihitung secara persentase, maka sekitar 22% penduduk Rajabasa Jaya yang masih berada pada kategori miskin menurut kriteria Badan Pusat Statistik (BPS). Kerentanan ini tercermin dari sebagian besar keluarga yang pendapatannya tidak stabil sehingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi dengan konsisten. Selain itu juga, terdapat anggota keluarga yang menghadapi keterbatasan dalam memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik.

Masyarakat miskin di Kelurahan Rajabasa Jaya masih berada dalam kondisi ekonomi rentan karena keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja yang stabil. Sebagian keluarga menggantungkan hidup pada pekerjaan berupah rendah atau yang sifatnya tidak menentu. Kondisi ini membuat pendapatan rumah tangga sulit memenuhi kebutuhan dasar secara konsisten. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya keterampilan juga menjadi faktor yang membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang stabil.

Maka, untuk membantu mengurangi beban masyarakat miskin, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program bantuan sosial, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan. Program ini menargetkan keluarga penerima manfaat KPM dengan memberikan bantuan bersyarat di bidang pendidikan dan kesehatan. Di Rajabasa

Jaya, keberadaan PKH menjadi sangat penting karena banyak keluarga miskin yang memiliki anak usia sekolah dan balita yang membutuhkan dukungan gizi serta layanan kesehatan. Namun, bantuan sosial tidak cukup untuk mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Perlu adanya upaya pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan kerja, serta perluasan lapangan kerja agar masyarakat mampu mandiri dan keluar dari ketergantungan pada bantuan pemerintah.

4.3.3 Kehidupan Sosial

Selain aspek ekonomi, kondisi sosial masyarakat juga merupakan faktor yang penting yang perlu dipahami dalam menggambarkan karakteristik suatu wilayah. Kehidupan sosial mencerminkan bagaimana masyarakat berinteraksi, menjaga solidaritas, dan membangun kebersamaan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Di kelurahan Rajabasa Jaya, kehidupan sosial masyarakat masih cukup kental.

Masyarakat Rajabasa Jaya yang berjumlah 12.471 jiwa hidup dalam lingkungan yang cukup padat, namun tetap mampu menjaga nilai kebersamaan. Interaksi sosial banyak terjalin melalui kegiatan masyarakat di tingkat RT maupun RW, serta melalui organisasi-organisasi lokal seperti PKK, Karang taruna, kelompok pengajian, hingga kegiatan kepemudaan. Melalui wadah tersebut, masyarakat tidak hanya berkumpul untuk melaksanakan kegiatan rutin, tetapi juga saling membantu dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan. Kegiatan sosial masyarakat Rajabasa Jaya juga sangat dipengaruhi oleh kegiatan keagamaan.

Berdasarkan data kelurahan, terdapat 15 masjid dan 9 mushola yang tersebar di berbagai lingkungan. Tempat-tempat ibadah tidak hanya digunakan untuk kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi pusat aktivitas sosial. Meskipun mayoritas penduduk Rajabasa Jaya beragama Islam, terdapat pula pemeluk agama lain seperti Kristen, Katolik, Buddha dan Hindu meskipun jumlahnya relatif kecil. Kehadiran

pemeluk agama yang berbeda ini menciptakan keberagaman sosial yang menarik.

Dengan kondisi sosial yang demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat Rajabasa jaya memiliki ikatan sosial yang cukup erat. Nilai gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan masih dijunjung tinggi, meskipun pengaruh kehidupan perkotaan semakin terasa. Kehidupan sosial yang harmonis dan penuh kebersamaan ini menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung program pembangunan. Solidaritas yang kuat memudahkan implementasi program karena masyarakat terbiasa bekerja sama dan saling membantu.

4.4 Gambaran PKH di Kelurahan Rajabasa Jaya

PKH merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui pemenuhan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Di Kelurahan Rajabasa Jaya, PKH menjadi program strategis mengingat masih terdapat keluarga miskin yang membutuhkan dukungan berkelanjutan. Berdasarkan data dari Kelurahan, terdapat 390 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar sebagai peserta aktif pada program ini.

Pelaksanaan PKH di wilayah ini dilakukan dengan pendampingan langsung oleh pendamping PKH yang menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Pendamping bertanggung jawab memastikan bahwa bantuan diterima tepat sasaran serta KPM mampu menjalankan kewajiban sesuai dengan regulasi yang berlaku pada Permensos No.1 Tahun 2018 Pasal 7, yakni: (a) memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun; (b) mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; (c) mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia dari mulai usia 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

KPM di Rajabasa Jaya tersebar pada beberapa kategori komponen. Dalam hal ini juga pendamping menjalankan fungsi pemantauan melalui pertemuan kelompok maupun kunjungan rumah. Pertemuan kelompok yang dilaksanakan setiap bulan sebagai ruang berbagi informasi, edukasi, dan penguatan motivasi kepada KPM. Sementara itu, *home visit* dilakukan untuk meninjau kondisi keluarga secara lebih mendalam.

Di Kelurahan Rajabasa Jaya telah ditemukan penerima manfaat yang telah melakukan graduasi mandiri. Graduasi mandiri dalam konteks PKH merupakan bentuk pengunduran diri secara sukarela dari kepesertaan program karena keluarga yang bersangkutan merasa kondisi sosial ekonominya telah membaik dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Proses ini tidak terjadi secara instan melainkan melalui tahapan untuk dapat mencapai graduasi mandiri.

Tabel 11. Graduasi Mandiri

KPM Graduasi Mandiri	Pekerjaan	Pendapatan	Kondisi Fisik Rumah	Status PKH
2019	KPM sebagai Ibu Rumah Tangga dan Suami yang bekerja sebagai pegawai	Pendapatan masih tergolong rendah.	Material (batu bata tanpa plester), alas rumah (semen halus),	Penerima PKH: - KPM masih ketergantungan - - Bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak
2020	KPM sebagai Ibu Rumah Tangga dan Suami yang	Pendapatan masih tergolong rendah.	Material (batu bata tanpa plester), alas rumah (semen halus),	Penerima PKH: - KPM masih ketergantungan - - Bantuan digunakan untuk

	bekerja sebagai pegawai			memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak
2021	KPM sebagai Ibu Rumah Tangga dan Suami yang bekerja sebagai pegawai	Pendapatan masih tergolong rendah.	Material (batu bata tanpa plester), alas rumah (semen halus),	Penerima PKH: - KPM masih ketergantungan - - Bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak
2022	KPM sebagai Ibu Rumah Tangga dan Suami yang bekerja sebagai pegawai	Pendapatan masih tergolong rendah.	Material (batu bata tanpa plester), alas rumah (semen halus),	Penerima PKH: - KPM masih ketergantungan - - Bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak
2023	Suami yang masih bekerja sebagai pegawai dan seorang anak yang mulai bekerja	Pendapatan lebih stabil	Material (batu bata tanpa plester), alas rumah (semen halus),	Penerima PKH: Pendapatan keluarga meningkat, mulai muncul kemandirian ekonomi secara bertahap.
2024	Suami yang masih bekerja	Pendapatan lebih stabil	Material dinding	Proses Graduasi Ekonomi

	sebagai pegawai dan seorang anak yang mulai bekerja		permanen (batu bata), Lantai permanen (keramik), atap tidak bocor.	semakin mandiri, bantuan tidak lagi menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan.
2025	Suami yang masih bekerja sebagai pegawai dan seorang anak yang mulai bekerja serta istri yang bekerja sebagai karyawan SPPG	Pendapatan keluarga lebih stabil dan meningkat	Material dinding permanen (batu bata), Lantai permanen (keramik), atap tidak bocor.	Graduasi Mandiri: Keluarga telah mandiri secara ekonomi dan pola pikir, mampu memenuhi kebutuhan tanpa bantuan sosial.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa telah ada KPM yang menunjukkan graduasi mandiri dan menunjukkan kondisi pekerjaan yang stabil, kemampuan ekonomi mandiri, serta kondisi fisik rumah yang layak huni. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, keputusan untuk melakukan graduasi mandiri didasarkan pada kesiapan ekonomi keluarga yang dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri tanpa ketergantungan terhadap bantuan sosial. Selain itu, dalam pelaksanaan program, pendamping PKH setiap tahunnya memiliki target untuk melakukan graduasi terhadap 10 KPM yang dinilai sudah memenuhi kebutuhan kriteria kemandirian, aturan ini sesuai dengan ketentuan dan arahan dari pemerintah.

Target tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan pendamping dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian keluarga penerima manfaat.

Secara umum, pelaksanaan PKH di Kelurahan Rajabasa Jaya tidak hanya sekedar berfokus pada pemberian bantuan tunai, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keluarga miskin agar mampu mandiri. Peran pendamping yang menjadi kunci dalam mengarahkan KPM agar memanfaatkan bantuan secara bijak, menjaga pola kesehatan, dan pendidikan anak, serta menumbuhkan kesadaran bahwa bantuan bersifat sementara. Dengan jumlah KPM yang cukup banyak, keberadaan PKH di Rajabasa Jaya memberikan kontribusi penting dalam upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat fungsi sosial keluarga.

4.5 Gambaran Pendamping PKH di Kelurahan Rajabasa Jaya

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rajabasa Jaya merupakan tenaga pelaksanaan lapangan yang bertugas membantu Kementerian Sosial dalam mengawasi pelaksanaan program perlindungan sosial keluarga miskin. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan sosial diterima tepat sasaran, serta mendorong penerima manfaat agar berproses menuju kemandirian. Pendamping PKH di wilayah Rajabasa Jaya ini umumnya memiliki latar belakang pendidikan sarjana dan telah mengikuti pelatihan terkait dengan mekanisme yang ditetapkan

Selain itu, pendamping juga memiliki peran sosial yang menuntun kemampuan komunikasi interpersonal, empati, dan kepemimpinan di lapangan. Pendamping juga aktif melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kepatuhan KPM terhadap kewajiban program. Pertemuan kelompok rutin diselenggarakan setiap satu bulan sekali sebagai media untuk menyampaikan dan mengembangkan potensi yang dimiliki KPM. Dalam pertemuan tersebut, pendamping juga mengarahkan KPM agar terlihat dalam kegiatan sosial dan ekonomi produktif.

Di Kelurahan Rajabasa Jaya peran pendamping tidak hanya terbatas pada pelaksanaan administrasi program, tetapi juga mencakup pembinaan sosial KPM. Pendamping menjalankan fungsi sebagai penghubung antara kebijakan program dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Peran tersebut menjadi penting mengingat jumlah KPM yang cukup banyak dibandingkan dengan jumlah pendamping juga terbatas. Meskipun demikian, pendamping tetap berupaya menjalankan tugasnya secara optimal. Upaya tersebut bertujuan untuk mendorong KPM agar tidak bergantung secara permanen pada bantuan sosial, melainkan mampu mencapai kemandirian ekonomi melalui proses graduasi mandiri.

Tabel 12. Deskripsi Peran Pendamping

Peran pendamping	Fasilitator	Edukator	Advokator
Pendamping 1	- Membantu KPM mengakses bantuan sosial - Memfasilitasi pertemuan kelompok - Menghubungkan KPM dengan layanan	- Memberikan edukasi - Memberikan penyampaian materi - Memotivasi KPM agar tidak bergantung pada bantuan	- Mendampingi KPM dalam menyelesaikan permasalahan data kepesertaan
Pendamping 2	- Membantu proses pencairan dana - Memfasilitasi layanan - Memfasilitasi pertemuan kelompok	- Membantu KPM untuk memanfaatkan bantuan secara produktif - Memotivasi KPM agar tidak	- Membantu KPM ketika mengalami kendala pencairan bantuan atau permasalahan lainnya terkait bantuan

		bergantung pada bantuan	
Pendamping 3	- Menentukan jadwal pertemuan kelompok - Memfasilitasi pertemuan kelompok	- Memberikan arahan dan motivasi agar KPM berproses menuju graduasi mandiri	- Membantu KPM dalam menyelesaikan masalah terkait bantuan

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga pendamping menjalankan peran yang relatif serupa, namun dengan pendekatan yang menyesuaikan kondisi KPM di lapangan. Peran sebagai fasilitator, edukator, dan advokator menunjukkan bahwa pendamping tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis program, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berupaya mendorong KPM menuju kemandirian.

Saat ini pendamping PKH di Kelurahan Rajabasa Jaya berjumlah tiga orang pendamping PKH dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 390 orang. Pendamping menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugasnya, meskipun masih menghadapi sejumlah hambatan tetapi upaya mereka dalam memberikan edukasi, motivasi dan membangun hubungan komunikatif dengan KPM menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Pendekatan humanis yang merupakan memahami pengalaman dan makna yang dirasakan pendamping mau KPM secara mendalam yang menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan PKH di wilayah Rajabasa Jaya.¹ Hal ini dikarenakan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kemandirian dan tanggung jawab sosial dalam memanfaatkan bantuan yang diterima.

¹ Al Habsy, B., Oktafiani, F., Salsabila, D. M., & Zahro, C. I. (2023). *Teori Humanistik dalam Proses Pembelajaran*. JTP: Jurnal Teknologi Pendidikan, 1(2), 1–12.

VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Rajabasa Jaya, dapat disimpulkan bahwa pendamping PKH memiliki peran yang strategis dalam mendorong kemandirian masyarakat miskin. Pendamping tidak hanya menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga berperan sebagai aktor sosial yang menjembatani kebijakan dengan realitas kehidupan keluarga penerima manfaat. Melalui peran fasilitator, pendamping membantu KPM dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial serta memastikan pemenuhan kewajiban program. Selain itu, pendamping juga menjalankan fungsi edukatif dengan memberikan pemahaman, motivasi, dan pengetahuan yang mendorong perubahan pola pikir KPM agar tidak semata-mata bergantung pada bantuan sosial. Dalam situasi tertentu, pendamping turut berperan sebagai advokator dengan membantu KPM menghadapi permasalahan administratif maupun sosial yang berkaitan dengan akses layanan publik.

Namun, dalam pelaksanaan peran tersebut tidak lepas dari berbagai hambatan. Hambatan teknis berupa keterbatasan fasilitas pendukung dalam penyampaian materi dan kesulitan menentukan waktu yang efektif menjadi kendala yang mengurangi optimal pelaksanaan program. Hambatan partisipasi KPM seperti KPM yang memiliki kesadaran rendah terhadap pertemuan kelompok, serta hambatan struktural yang berupa belum tersedianya program pelatihan keterampilan ekonomi seperti UMKM, menjadi tantangan signifikan yang harus dihadapi pendamping. Kondisi ini mencerminkan fenomena *role strain* dalam teori Merton, yaitu ketegangan peran yang muncul ketika pendamping harus memenuhi berbagai tuntutan peran secara bersamaan.

Ketidakseimbangan ini dapat menciptakan tekanan yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan program.

Meskipun menghadapi hambatan tersebut, peran pendamping telah memberikan kontribusi nyata terhadap proses kemandirian masyarakat miskin. Perubahan pola pikir KPM dan orientasi menuju kemandirian menunjukkan bahwa proses pendampingan yang dilakukan tidak hanya informatif tetapi menunjukkan adanya perubahan dari KPM. Dalam perspektif teori struktural fungsionalis Robert K. Merton, pendamping PKH menempati status sebagai pelaksana program yang memiliki seperangkat peran (*role set*) yang dijalankan secara bersamaan. Dalam konteks ini, teori peran Merton menegaskan bahwa keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh kesesuaian antara *role expectation* dengan *role performance*, di mana pendamping tidak hanya menjalankan fungsi administratif tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang memfasilitasi proses perubahan masyarakat miskin menuju kemandirian. Dengan demikian, peran pendamping PKH bukan hanya sekedar penyaluran bantuan, melainkan fasilitator, edukator, dan advokator yang mendorong KPM untuk membangun kapasitas diri, memanfaatkan sumber daya secara produktif, dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Pendamping PKH, diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan komunikasi agar proses pendampingan lebih efektif. Pendamping juga perlu memperkuat pendekatan partisipatif dengan KPM sehingga penerima manfaat tidak hanya menerima arahan, tetapi juga berperan aktif dalam setiap kegiatan.

6.2.2 Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), diharapkan mampu memanfaatkan bantuan PKH secara produktif dan menanamkan kesadaran bahwa program ini bersifat sementara. Kemandirian sosial dan ekonomi perlu terus ditingkatkan melalui usaha kecil, keterlibatan dalam kegiatan kelompok, serta pemanfaatan keterampilan yang telah diperoleh dari proses pendampingan.

- 6.2.3 Bagi Aparat Kelurahan atau Pemerintah,** disarankan untuk memberikan pelatihan lanjutan bagi pendamping di lapangan serta penyediaan dukungan alat dalam proses penyampaian materi. Selain itu, agar pemerintah dalam proses rekrutmen pendamping PKH lebih memprioritaskan tenaga pendamping dengan latar belakang pendidikan ilmu sosial, guna meningkatkan kualitas pendampingan.
- 6.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya,** disarankan untuk mengkaji peran pendamping menggunakan metode yang berbeda untuk mengukur tingkat efektivitas peran pendamping terhadap peningkatan kemandirian KPM secara lebih luas. Selain itu, penelitian ini dapat dikembangkan dengan membandingkan kinerja pendamping di wilayah perkotaan dan di pedesaan untuk melihat variasi dinamika sosial yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2021). *Sosiologi (Sistematika, Teori, dan Terapan)*. PT. Bumi Aksara.
- Agata, S. F. (2025). *Peran Pendamping PKH dalam Program Penyaluran Bantuan Sosial di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Al Habsy, B., Oktafiani, F., Salsabila, D. M., & Zahro, C. I. (2023). *Teori Humanistik dalam Proses Pembelajaran*. JTP: Jurnal Teknologi Pendidikan, 1(2), 1–12.
- Anggraini, V. (2022). *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Assyakurrohim, D. I. (2022). Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 1-9.
- Aziz, M. S. *Peran Pendamping Sosial Pada Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Cileungsi Kidul Kabupaten Bogor* (Bachelor's thesis, Falkultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi).
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Gini ratio September 2024 tercatat sebesar 0,381* [Berita resmi statistik]. BPS. Diakses 6 September 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2399/gini-ratio-september-2024-tercatat-sebesar-0-381.html>
- Creative HUB Fisipol UGM. (2022). Dimensi pemberdayaan masyarakat. Diakses 7 September 2025, dari <https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2022/01/21/dimensi-pemberdayaan-masyarakat/>
- Creswell. JW. (2015). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. *Pustaka Mahasiswa*, 383.
- Dataloka. 2025. *Jumlah penduduk lansia di dunia 2024 menurut WHO*. Ditaloka.id. Diakses 7 Februari 2025. dari <https://dataloka.id/humaniora/2627/jumlah-penduduk-lansia-di-dunia-2024-menurut-who/>
- Faustina, B., Susilowati, E., & Gaol, H. L. (2025). Menggali peran pendamping sosial dalam mendorong kemandirian ekonomi KPM PKH: Studi kasus di Kelurahan Kebon Jayanti Kota Bandung. *Lindayasos: Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial*, 6(2), 60–66. <https://doi.org/10.31595/lindayasos.v6i2.1413>

- Fetni, La Ode Anhusadar, & Aswar. (2025). Peningkatan kapasitas keluarga melalui peran pendamping PKH di Kabupaten Muna. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 6(1), 291–298. <https://doi.org/10.47492/jip.v6i1.6179>
- Goma, E. I., Sandy, A. T., & Zakaria, M. (2021). Analisis Distribusi dan Interpretasi Data Penduduk Usia Produktif Indonesia Tahun 2020. *Georafflesia*, 6(1), 20–27.
- Gustya, D. S. (2024). Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan (Studi Di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung).
- Kelurahan Rajabasa Jaya. (2025). *Profil Kelurahan Rajabasa Jaya Tahun 2025*. Bandar Lampung: Kantor Kelurahan Rajabasa Jaya.
- Kementerian Sosial RI. (n.d.). Program Keluarga Harapan (PKH). Diakses 6 September 2025, dari <https://kemensos.go.id/program-bantuan-sosial/pkh>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187. <https://jdih.kemensos.go.id>
- Khairi, D. A., dkk. (2022). Konsep Sektor Informal dalam Konteks Teori Pembangunan. *REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 17(2), 360–386.
- Khomsan, A., Dharmawan, A. H., Saharuddin, Alfiasari, Syarief, H., & Sukandar, D. (2015). *Indikator kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- La Patilaya, H., Sinurat, J., Sarasati, B., Jumiyati, S., Supriatna, A., Harto, B., ... & Hapsari, T. D. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat*.
- Madaliyah, M., & Rohmah, S. (2024). Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 3(2), 269–273.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish. ISBN 978-623-02-0097-7
- Merton, R. K. (1957). The role-set: Problems in sociological theory. *The British journal of sociology*, 8(2), 106-120.
- Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure*. Simon and Schuster.
- Mutiara, M. (2021). *Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi Kasus Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

- Nurandani, M. A., Sutyoso, B. U., & Suropto, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Bandar Lampung. *Wacana Publik*, 16(2), 97-106.
- Nurandani, M. A. (2021). *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Di Kota Bandar Lampung* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).
- Pakpahan, H. T., Kurniasih, S., Heryadi, D. Y., Fauziah, A., Eka, A. P. B., Tahir, M. I., Andayani, Q., Fachri, A., Sumartono, E., & Budaraga, I. K. (2024). *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. CV HEI nurandaniPUBLISHING INDONESIA.
- Purwanti, P. (2022). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Magelang Selatan. *Journal of Society and Continuing Education*, 3(2), 383-390.
- Rizal, D. A., & Purnairawan, R. E. (2024). Analisis kebijakan pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Joko Widodo. *Journal of Social Movements*, 1(1), 26–40. <https://doi.org/10.62491/jsm.v1i1.2024.2>
- Septiani, D., Nurmalisa, Y., & Halim, A. (2019). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Kemandirian Dan Kesejahteraan Keluarga. *JURNAL KULTUR DEMOKRASI (JKD)*, 5(1).
- Soekanto, S. (2002). *Peranan*. Universitas Sumatera Utara. Diakses dari <https://adoc.pub/peranan-menurut-soerjono-soekanto-2002243-adalah-p.pdf>
- Sumodiningrat, G. (1999). Jaring pengaman sosial dan pemberdayaan masyarakat. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 14(3).
- Suwandi, G. D. (2024). Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan.
- Wulandari, N. (2021). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Yulizar, F. S. (2022). Keberhasilan Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung).
- Zen, M. H. *Strategi Pendampingan Sosial Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat Di Kelurahan Cempaka Putih Tangerang Selatan* (Bachelor's thesis, Falkutas Dakwah Dan Komunikasi).